

**ANALISIS DISKURSUS KRITIK AYIK HERIANSYAH
TERHADAP PROPAGANDA KHILĀFAH ḤIZB AL-TAHRĪR
INDONESIA PASCA PEMBUBARAN PERSPEKTIF NORMAN
FAIRCLOUGH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program
Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

Siti Mafrukhah

NIM: E21216100

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILLSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Siti Mafrukhah
NIM : E21216100
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juli 2021

Saya yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a portion of a blue and white 10,000 Indonesian Rupiah banknote. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the serial number E9E35AJX104677203. The signature is stylized and appears to read 'Siti Mafrukhah'.

SITI MAFRUKHAH

NIM : E21216100

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh SITI MAFRUKHAH (E21216100) dengan judul “**ANALISIS DISKURSUS KRITIK AYIK HERIANSYAH TERHADAP PROPAGANDA KHLĀFAH ḤIZB AL-TAHRIR INDONESIA PASCA PEMBUBARAN PERSPEKTIF NORMAN FAIRCLOUGH**” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 13 Juli 2021

Pembimbing



FIKRI MAHZUMI, S.Hum, M.Fil.I

NIP : 198204152015031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Analisis Diskursus Kritik Ayik Heriansyah Terhadap Propaganda Khilāfah Hizb al-Tahrīr Indonesia Pasca Pembubaran Perspektif Norman Fairclough” yang telah ditulis oleh Siti Mafrukhah ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 15 Juli 2021.

Tim Penguji:

Fikri Mahzumi, S.Hum, M.Fil,I

(Ketua).....

Dr. Kasno, M.Ag.

(Penguji I).....

Dr. Suhermanto, M.Hum

(Penguji II).....

Muchammad Helmi Umam, M.Hum

(Penguji III).....

Surabaya, 23 Juli 2021




Dr. Kunawi, M.Ag

NIP. 196409181992031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Mafrukhah
NIM : E21216100
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Aqidah Filsafat Islam
E-mail address : mafrukhahs@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Diskursus Kritik Ayik Heriansyah Terhadap Propaganda Khilāfah Hizb al-Tahrīr

Indonesia Pasca Pembubaran Perspektif Norman Fairclough

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juli 2021

Penulis

(Siti Mafrukhah)
nama terang dan tanda tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meskipun Hizb al-Tahrir Indonesia (HTI) menjadi organisasi terlarang secara hukum di Indonesia, namun ideologi yang diusung mengenai khilāfah menjadi topik kajian yang tak pernah surut. Ideologi ini (khilāfah Islamiyah)¹ dipaksa menggantikan Pancasila yang merupakan ideologi sah bangsa Indonesia. Banyak upaya yang dilakukan para anggotanya demi mewujudkan *Daulah Islamiyah* di Indonesia, termasuk melakukan propaganda.

Latar belakang seruan untuk menegakkan khilāfah ini didukung dengan peristiwa menyedihkan bagi Hizb al-Tahrir² yaitu hancurnya Daulah Khilāfah di Istanbul. Pada tanggal 3 Maret 1924 M, Muṣṭafā Kemal Atatürk didukung Inggris menghapus sistem khilāfah³ dengan mengganti sistem sekuler. Penghapusan khilāfah membuka kesempatan negara kolonialis

¹ *Khilāfah Islamiyah* sebagai sistem yang mengandaikan bersatunya umat Islam dibawah kekuasaan seorang *khalifah*. Tujuannya di Indonesia adalah menjadikan Indonesia bagian dari pemerintah khilāfah seperti pada zaman Nabi dan hukum Islam kembali diberlakukan lagi di dunia.

² Taqi al-Din ibn Ibrahim ibn Mustofa ibn Ismail ibn Yusuf al-Nabhanī mendirikan, sekaligus menjadi amir pertama Hizbut Tahrir (1909-1977) pada tahun 1953 di kota Jerussalem Timur. Karir pendidikannya ditempuh dengan belajar hukum Islam di Universitas Al-Azhar Kairo. Nabhanī merupakan seorang juru tulis, aktivis politik dan pernah menjadi hakim di pengadilan agama Palestina. Jika bukan simpatisan, maka Nabhanī dahulu merupakan anggota dari Ikhwanul Muslimīn. Pengaruh IM dapat dirasakan dalam pemikiran agama dan politiknya. Lihat, Ahmad Shāfi'ī Mufid (ed), *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), 9. Dikutip dari Suha Taji Farouki, *A Fundamental Quest: Hizb al-Tahrir and the Search for the Islamic Caliphate* (London: Grey Seal, 1996), 1-2.

³ Tim HTI, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia* (Jakarta: HTI Press: 2009), 73.

ada bai'at dipundaknya, maka matinya (dalam keadaan) jāhiliyyah".⁶

Ketiga, syariat Islam wajib diterapkan dengan benar dalam khilāfah sesuai ketetapan Allah di al-Qur'ān dan as-Sunnah. Hal ini merujuk pada *Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim*,⁷

Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang fasik.⁸

Keempat, sistem demokrasi dilarang untuk diterima, diterapkan, dan didakwahkan oleh umat Islam. Ini merujuk pada *Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam*.⁹

Kelima, 'amār ma'rūf nahī munkar menjadi kewajiban bagi setiap warga. Sedangkan, permintaan pertanggung-jawaban penguasa saat ini tidak mudah, dikarenakan sistem pemerintahan sekarang diluar kendali khilāfah. Menurut HT, hanya didalam khilāfahlah kontrol yang ketat dapat dilakukan sesuai sabda Rasūlullāh SAW: *Demi zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, hendaklah kalian melakukan 'amār ma'rūf nahī munkar, atau Allah akan menurunkan hukum atas kalian, kemudian*

⁶ H.R Muslim. Lihat, Hizbut Tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia; Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam* (Jakarta: HTI-Press, 2009), 15.

⁷ Q.S al-Maidah [5]: 44. Lihat, Hizbut Tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia; Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam* (Jakarta: HTI-Press, 2009), 16.

⁸ Q.S al-Maidah [5]: 47. Lihat, Hizbut Tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia; Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam* (Jakarta: HTI-Press, 2009), 16.

⁹ Q.S ali-'Imran [3]: 19. Lihat, Hizbut Tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia; Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam* (Jakarta: HTI-Press, 2009), 16.

Melalui jalur hukum, HTI memang resmi dibubarkan pemerintah didasarkan pada turunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat terlarang anti-Pancasila. Surat pencabutan didasarkan pada pasal 80A dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017, didalamnya dituliskan tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Perpu ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.¹² Terdaftar HTI sebagai organisasi sosial keagamaan di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri dengan nomor 44/D.III.2/VI/2006, menunjukkan bahwa dulunya HTI telah diakui negara. Indonesia menjadi negara kesekian yang melarang kehadiran HTI, mengikuti jejak negara seperti Mesir, Yordania, Rusia, Malaysia, Turki dan lain sebagainya.¹³

Pembubaran ini dilakukan secara paksa dengan alasan membahayakan ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila. Pembubaran yang dikeluarkan oleh pemerintah ini kemudian berlanjut pada sidang, lalu pengajuan banding, kemudian kasasi oleh pihak HTI. Mahkamah Agung (MA) menolak pengajuan

¹²Lihat, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53279/perpu-no-2-tahun-2017> diakses pada 7/11/2019. Database ini adalah bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Khususnya dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik di kalangan internal BPK RI maupun masyarakat pada umumnya.

¹³Abdul Qohar dan Kiki Muhamad Hakiki “Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional HTI Sebelum dan Sesudah Pembubaran”, *Kalam*, Vol. 11, No. 2 (Desember, 2017).

kepada pemerintah disisi lain. Langkah yang memang harus digerakkan adalah mengedukasi masyarakat bahwa film tersebut memiliki propaganda melalui jalan indoktrinasi yang memanipulasi sejarah.

Kritik Ayik Heriansyah terhadap propaganda khilāfah HTI pasca dibubarkan kemudian menjadi latar belakang penulis untuk menganalisis lebih lanjut tulisan Ayik. Kritik tentang HTI banyak *publish* di web Islam, seperti *harakatuna*, *itnujabar*, *arrahmahnews*, dan lainnya. Ada juga upaya pengamatan perkembangan HTI di media sosial. Kemudian, permasalahan yang dibahas akan lebih fokus terhadap analisis diskursus kritik Ayik Heriansyah terhadap propaganda khilāfah HTI pasca dibubarkan. Penelitian didekati dengan melakukan riset literatur, wawancara, dan observasi terhadap adanya kritik propaganda khilāfah oleh Ayik Heriansyah.

Skripsi yang berjudul Analisis Diskursus Kritik Ayik Heriansyah Terhadap Propaganda Khilāfah Hizb al-Tahrir Indonesia Pasca Pembubaran Perspektif Norman Fairclough tentu memiliki batasan-batasan penelitian. *Pertama*, dalam objek materialnya peneliti membahas analisis peneliti terhadap diskursus kritik seorang Ayik Heriansyah yang merupakan mantan anggota HTI terhadap propaganda khilāfah yang dilakukan HTI meski telah dibubarkan. Penelitian ini juga terbatas pada beberapa artikel yang ditulis oleh Ayik Heriansyah. *Kedua*, dalam objek formalnya peneliti terbatas pada teori analisis wacana kritis milik Norman Fairclough.

berhubungan dengan konteks dari media dalam hubungannya dengan masyarakat atas budaya politik tertentu.²⁰ Selain menggunakan tiga dimensi, dalam menganalisis dibutuhkan empat langkah metodologi AWK Norman Fairclough. Karena, tiga dimensi dengan empat langkah metodologi berbeda dalam AWK ini. Sedangkan empat langkah metodologi AWK itu meliputi: (1) Memfokuskan pada “ketidakberesan sosial” dalam aspek semiotiknya. (2) Mengidentifikasi hambatan-hambatan untuk menangani “ketidakberesan sosial” itu. (3) Mengidentifikasi siapa yang diuntungkan sehingga menghendaki ketidakberesan sosial itu. (4) Mengidentifikasi cara-cara yang memungkinkan untuk mengatasi hambatan-hambatan.

B. Rumusan Masalah

Penulis ingin menjawab persoalan berdasarkan penjabaran yang tertera diatas antara lain:

1. Bagaimana Ayik Heriansyah mengkritik propaganda khilāfah Hizb al-Tahrīr Indonesia (HTI) pasca pembubaran?
2. Bagaimana analisis wacana kritis terhadap narasi yang diproduksi oleh Ayik Heriansyah?

²⁰ Lihat, Aris Badara, *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media* (Jakarta: Kencana, 2012), 26. Dikutip dari Marianne Jorgensen and Louis Phillips, *Discourse Analysis: As Theory and Methode* (London: Sage Publication, 2002), 66.

dimunculkan adalah digunakannya sejarah sebagai legitimasi keagamaan, dan penonjolan identitas keislaman yang mencolok.²¹

Kedua, sebuah terbitan dari *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 8, No. 2, Juni 2018 dari penulis M. Rikza Muqtada dengan judul “Ḥadis Khilāfah dan Relasinya Terhadap Kontestasi Politik Hizbut Tahrīr Indonesia (HTI) Pasca-Perpu Nomor 2 Tahun 2017”. Dalam jurnal ini penulis menjelaskan ḥadīth yang dijadikan legalitas sumber khilāfah oleh HTI dan tergolong bermasalah. Dalam al-Qur’ān bahkan tidak disinggung tentang khilāfah. Untuk mewujudkan mimpi berdirinya Negara Islam, HTI telah mencampur aduk fungsi agama dan politis menjadi satu.²²

Ketiga, *Jurnal Mahasiswa Unesa*, 2018 ditulis oleh Michelle Noor Azzahro dan Putri Aisyiyah Rachma Dewi dengan judul “Analisis Framing Pemberitaan Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Di Kompas.com, Tempo.co, dan Republika.co.id”. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui framing yang terdapat pada pemberitaan akan bubarnya Ḥizb al-Tahrīr di Kompas.com, Tempo.co, dan Republica.co.id. Menggunakan pendekatan penniselitan kualitatif dan menggunakan metode analisis framing yang digagas oleh Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki. Hasilnya, terdapat

²¹ Ahmad Khotim Muzakka, “Propaganda Khilafah HTI di Indonesia”, *JURNAL PENELITIAN*, Vol. 14, No. 2, (2017).

²²M. Rikza Muqtada, “Ḥadis Khilāfah dan Relasinya Terhadap Kontestasi Politik HizbutTahrir Indonesia (HTI) Pasca-Perpu Nomor 2 Tahun 2017”, *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 8 No. 2, (Juni 2018).

G. Penggalian Data

Sumber yang valid sangat dibutuhkan dalam setiap penelitian. Dalam hal ini sumber data dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer, yakni sumber data yang berkaitan langsung dengan pokok pembahasan yakni analisis diskursus kritik Ayik Heriansyah terhadap propaganda Hizb al-Tahrir Indonesia pasca dibubarkan. Data pokok ini meliputi narasi Ayik yang ditampilkan di beberapa web Islam, salah satu narasinya, akan dianalisis menggunakan CDA/ AWK Norman Fairclough.
2. Sumber Data Sekunder, yakni sumber penunjang dari data pokok yang meliputi buku-buku seperti karya Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Indonesia*. Tim HTI yang juga menerbitkan karya *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia*. Muhammad Muhsin Rodhi, diterjemahkan oleh Muhammad Bajuri dan Romli Abu Wafa, berjudul *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah*. Buku Analisis Wacana Kritis: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media karya Aris Badara, M. Rikza Muqtada dengan judul “Ḥadis Khilāfah dan Relasinya Terhadap Kontestasi Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pasca-Perpu Nomor 2 Tahun 2017”, Mutawatir: Jurnal KeilmuanTafsir Hadis Vol. 8 No. 2 tahun 2018. Abdul Qohar dan Kiki Muhamad Hakiki. “Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional HTI Sebelum

dan Sesudah Pembubaran”, *Jurnal Kalam*, Vol. 11, No. 2. Desember, 2017. Syarafuddin HZ, dan Zaki Faddad Syarif Zain “Khilafahisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 18, No. 1. 2017. Webinar Analisis Wacana Kritis: Praktik dan Penerapannya oleh Haryatmoko yang diselenggarakan oleh Universitas Pamulang dalam media online *youtube*, dan berbagai berita yang mengarah pada perkembangan objek kajian penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Rancangan penelitian dengan judul “Analisis Diskursus Kritik Ayik Heriansyah terhadap Propaganda Khilāfah Ḥizb al-Tahrīr Indonesia pasca Pembubaran Perspektif Norman Fairclough” akan diurai secara terstruktur dalam bentuk pembahasan bab. Berikut susunan pembahasan bab demi bab.

Bab pertama, menjelaskan beberapa hal penting yang bisa memberi panduan awal kepada peneliti tentang apa dan hendak kemana peneliti berjalan. Bagian ini disebutkan antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, penelitian terdahulu, dan metode penelitian yang diaplikasikan untuk menjawab masalah, hingga alur pembahasan antar-bab.

Bab kedua, membahas tentang kerangka pemikiran, konsep propaganda khilafah HTI pasca pembubaran: HTI, bentuk propaganda dan pro-kontra pembubaran.

ke seluruh dunia, banyak negara di Timur Tengah yang menyatakan HT sebagai organisasi terlarang. Negara tersebut diantaranya: Mesir, Irak, Pakistan, Turki, Aljazair, dan Maroko.

HT menjadi salah satu gerakan Islam kontemporer yang berpengaruh cukup besar di dunia Islam. Sebagai partai politik internasional, tujuannya adalah mendirikan Negara Khilāfah versi HT. Dalam upayanya, telah disiapkan Undang-Undang Dasar Negara Khilāfah yang bersumber dari kitab-kitab utama HT, *mutabanni*. Sudah ada bentuk negara, sistem pemerintahan, perangkat, dan aparat negara. UUD Negara Khilāfah juga telah diresmikan oleh HT Internasional. Sama-sama memperjuangkan satu asas, satu bentuk negara, dan tunduk pada kepemimpinan Internasional.

UUD Negara Khilāfah dan bentuk negara Khilāfah telah diputuskan dan ditulis sejak 1953 berjudul *Nidzamul Islam* oleh pendiri HT, Taqiyuddin an-Nabhāni. UUD berisi 191 pasal, bertujuan membangun negara agama yang mutlak dikendalikan oleh seorang pemimpin tertinggi dengan kewenangan yang absolut, yakni Khalifah. Seluruh kewenangan ada di tangan seorang Khalifah, tidak ada pembagian kewenangan eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Memiliki hak melegislasi Undang-Undang, mengangkat hakim-hakim peradilan, dan tidak memiliki masa jabatan. Khalifah dalam sistem pemerintahan Khilāfah versi HT adalah Presiden sekaligus MPR, DPR, Ketua MA, Ketua MK, Ketua KPK, dan semua kewenangan hanya berpusat padanya. Bahkan dalam hal perbedaan pendapat

awal persatuan kembali seluruh dunia Islam menuju negara paling kuat di dunia. Itulah mengapa kemudian Indonesia dijadikan titik awal tegaknya khilāfah.

HTI juga menggambarkan, sejak kemerdekaan, keterpurukan terus membawa Indonesia karena tidak diterapkannya sistem Islam didalamnya. Perkara-perkara seperti riba atau bunga bank, pornografi dan pornoaksi, hingga kerjasama dengan orang kafir untuk memerangi umat Islam merupakan gagalnya sistem sekuler yang terap di Indonesia. Kebaikan dan kemajuan tidak akan pernah dihasilkan oleh tatanan sistem sekuler yang saat ini diterapkan di Indonesia. Sistem yang rusak dan bertentangan dengan akidah Islam, nyatanya menjauhkan umat Islam dari kecintaan kepada agama Allah SWT.

Fenomena munculnya gerakan Islam juga muncul di nusantara setelah runtuhnya rezim Soeharto. Pergerakan ini meliputi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Laskar Jihad, Front Pembela Islam (FPI), Hizb al-Tahrir, dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Sejak tahun 1980-an universitas kenamaan Indonesia seperti Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya dan lainnya menjadi tempat penyebaran pengaruh gerakan tarbiyah. Selain menggelar pengajian, halaqah, daurah, hingga bedah buku, tak sedikit yang turun demo menyuarakan isu-isu moralitas, politik, keagamaan, konflik Timur-Tengah, hingga penerapan syariah sebagai solusi.

pesan yang disampaikan. Aktivitas manusia dapat digunakan untuk tujuan sosial ataupun sebaliknya yakni disalahgunakan.

Pengertian menurut beberapa tokoh yang *pertama* James E. Combs dan Dan Nimmo (1994:23). Propaganda merupakan; (a). Usaha yang disengaja dan sistematis untuk mencapai respon yang lebih jauh lagi. (b). Sebuah usaha untuk mempengaruhi opini dan tingkah laku. (c). Semua usaha yang membujuk setiap orang untuk percaya atau untuk suatu bentuk tindakan. (d). Usaha untuk mempengaruhi personalitas dan mengontrol tingkah laku individual menuju tujuan akhir yang dianggap tidak ilmiah atau nilainya merugikan dalam masyarakat pada waktu yang ditentukan.

Kedua, menurut Qualter. Propaganda adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja oleh beberapa individu atau kelompok-kelompok lain dengan menggunakan media komunikasi dengan tujuan bahwa pada setiap situasi yang tersedia, reaksi dari mereka yang dipengaruhi akan seperti yang diinginkan oleh si propagandis. *Ketiga*, menurut Lasswel propaganda dalam pengertian yang luas adalah teknik untuk mempengaruhi kegiatan manusia dengan memanipulasikan representasinya. *Keempat*, menurut Barnays propaganda modern adalah suatu usaha yang bersifat konsisten dan terus menerus untuk menciptakan atau membentuk peristiwa-peristiwa guna mempengaruhi hubungan publik terhadap suatu penguasa atau kelompok. *Kelima*, menurut Ralph D. Casey propaganda adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dan sadar untuk menetapkan suatu sikap atau

mengubah suatu pendapat yang berkaitan dengan suatu doktrin atau program, dan di pihak lain merupakan suatu usaha yang sadar dari lembaga-lembaga komunikasi, untuk menyebarkan fakta dalam semangat obyektivitas dan kejujuran. *Keenam*, menurut R.A Santoso Sastropetro propaganda adalahh suatu penyebaram pesan yang terlebih dahulu telah direncanakan secara seksama untuk mengubah sikap, pandangan, pendapat, dan tingkah laku dari penerima komunikan sesuai dengan pola yang telah ditetapkan oleh komunikator.

Opini umum bisa dibuat dengan cara mengajukan berbagai pandangan yang dapat menggoyahkan keyakinan-keyakinan sebelumnya yang bahkan telah tertanam di hati dan pikiran masyarakat. Apabila usaha semacam ini dapat perhatian, maka secara rutin harus diberikan lagi pandangan yang secara sosial dapat diterima. Keyakinan yang telah lama tertanam dapat dengan mudah tergoyahkan dan akhirnya akan tumbang.

Publik diatur meliputi pikiran, ide-ide dan selera. Manipulasi yang terorganisir ini kemudian memerlukan alat untuk penyebarannya, yakni media massa. Media massa meliputi televisi, radio, baliho, spanduk, dan sebagainya. Media online juga menempati pengaruh besar bagi penyebaran propaganda. Dengan menilik survei, pengguna internet di Indonesia mengalami kenaikan yakni mendekati angka 200 juta dan akan mengalami kenaikan per tahunnya.

Politik sebagai jalan utama, dan non politik sebagai penunjang tercapainya khilāfah. Jalan yang kemudian harus ditempuh adalah dengan melancarkan aksi

propaganda ke seluruh masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, aksi kelompok pengusung khilāfah akan terus mempropagandakan agenda mereka. Walaupun tak sedikit negara yang menolak gagasan ideologi khilāfah, namun propaganda gencar disajikan melalui media sosial. Penyebaran propaganda oleh pendukung khilāfah terus digaungkan agar siapapun bergabung dengan perjuangan mereka. Secara bersamaan pula, usaha menyudutkan pemerintah gencar dilakukan. Berbeda dengan gerakan *Ikhwanul Muslimin* yang dapat menyesuaikan diri dengan pemerintah, prinsip dasar perjuangan HTI senantiasa menjaga jarak dan bersifat non-kooperatif. Para pengusung khilāfah HTI berpandangan bahwa NKRI merupakan *Dar al-Kufr* (negara kufur) maka dari itu harus berubah menjadi khilāfah versi HTI. Khilāfah ala HTI ini mengacu pada pandangan Taqiyuddin an-Nabhani sebagai pendiri HT.

Penyebutan Khilāfah tidak hanya digaungkan oleh HTI, konsep Khilāfah pun beragam. Khilāfah ala ISIS, Khilāfah ala HTI, Khilāfah ala Ahmadiyah, dan sebagainya. Khilāfah Tahririyah yang kemudian paling tepat disematkan pada HTI. Pembebasan negara berpenduduk muslim dan dikuasai kafir menuju daulah Islam yang tunggal, menggunakan sistem pemerintahan Khilāfah, dan dipimpin oleh seorang khalifah, atau disebut dengan *Amir*.

Wacana pendirian Khilāfah Tahririyah dilakukan dengan berbagai upaya. Penggiringan opini sangat penting dilakukan kaum Khilāfah terhadap berbagai lapisan masyarakat. Dengan bantuan media sosial, seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses segala macam informasi, termasuk propaganda Khilāfah. Seiring

berjalannya waktu, peran aktor seperti Felix J. Siauww dalam mengadaptasi dan meminjam ide-ide Tahriri ke dalam bahasa yang sesuai dengan aspirasi kaum Milenial Muslim masa kini. Buku karya Felix yang berjudul *Muhammad Alfatih 1453*, dinilai menggiring pembaca mengikuti konsep perjuangan Khilāfah versi HTI.

Ide HT telah dikritik hingga dibantah oleh banyak ulama bahkan ulama HT sendiri seperti Syaikh Umar Bakri Muhammad (perintis HT di Arab Saudi dan Inggris), Dr. Samith Athif az-Zain (murid langsung Taqiyuddin an-Nabhāni), Syaikh Bakri Salim Khawalidah (ulama paling cerdas di lajnah tsaqafiyah HT pusat), Syaikh Abdurrahman al-Baghdādi (pembawa HT ke Indonesia), Syaikh Mahmud Abdul Lathif Uwaidhoh (ahli hadith dari lajnah tsaqafiyah HT pusat)⁴³

C. Turunnya Perpu HTI: Pro dan Kontra

Dibanyak negara menjadi organisasi terlarang, namun sebaliknya di Indonesia. Pesatnya perkembangan HT dalam dasawarsa terakhir, menjadikan lebih dari empat puluh negara seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan negara pecahan Uni Soviet, masuk dalam list penyebaran HT. Kegiatan utamanya adalah menyebarkan pemikiran Islam, memperkuat aqidah dan ideologi Islam di tengah masyarakat melalui forum halaqah, meski dibawah tekanan pemerintah.

⁴³ Rahmawan Wicaksono, <https://www.islampers.com/2019/07/curhat-felix-siauww-sang-tokoh-hti-di-media-sosial.html>, diakses pada 14 November 2020.

Terdaftar HTI menjadi organisasi masyarakat, menjadi satu kesempatan untuk penyebaran visi dan misi secara terang-terangan. Menyembunyikan identitas yang anti Pancasila, untuk bergerak mengganti ideologi negara. Organisasi ini kemudian berdakwah dengan jalan yang sangat hati-hati dan dibuat semenarik mungkin. Tak bisa instan dengan sekali kerja, penyebaran doktrin dibuat transparan bernada khilāfah. Dikatakan bahwa HTI menasar ke berbagai golongan masyarakat demi tertujunya mimpi mereka. Sepeninggal Abdurrahman al-Baghdadi, kepemimpinan HTI berada dibawah kendali Muhammad al-Khathath beserta Ismail Yusanto sebagai juru bicara. Jelas penyebarannya hingga kini telah memasuki 33 provinsi di Indonesia.

Konsep *khilāfah* yang diusung oleh kelompok HTI kemudian terbentur dengan ideologi bangsa Indonesia bernama Pancasila. Polemik Pancasila telah terjadi sejak perubahan Piagam Jakarta dan terletak pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tujuh kata pada sila pertama Piagam Jakarta kemudian dihapus dan diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Digantinya sila pertama, karena sila pertama Piagam Jakarta lebih condong ke Islam, sedangkan Indonesia menerima lebih dari satu agama. Bagi para penentang Ideologi Pancasila, adanya Piagam Jakarta seharusnya telah menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Mereka menuntut penerapan syariah Islam agar Piagam Jakarta kembali kedalam konstitusi. Nyatanya, masyarakat Indonesia telah sepakat dengan Pancasila sebagai ideologi.

Perdebatan ideologi dengan menarasikan pasangan kubu nomor urut satu (Pancasila) dan kubu nomor urut dua (Khilāfah Islām), kembali terjadi pada peristiwa pemilihan presiden Republik Indonesia tahun 2019.⁴⁴

Keluarnya Perpu di era pemerintahan Presiden Jokowi menjadi jalan dalam membubarkan HTI. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan memaksa, mendesak, atau darurat sehingga perlu payung hukum untuk mengatasinya. Kedudukan Perpu dalam peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 secara berurutan adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

UU dan Perpu memiliki kedudukan yang sejajar. Perpu terkadang tidak sejajar dengan UU dikarenakan belum disetujui oleh DPR.⁴⁵ Selama ini UU selalu dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR, dan dalam keadaan normal, atau menurut Perubahan UUD 1945 dibentuk oleh DPR dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, serta disahkan oleh Presiden. Sedangkan Perpu dibentuk oleh Presiden

⁴⁴ Ulasan mengenai ideologi Pancasila versus Khilafah Islamiyah dapat dilihat dalam Etik Dwi Kurniawati, *Khilafah Islam Versus Pancasila: Studi Tentang Perdebatan Ideologi di Kalangan Generasi Milenial Melalui Media Sosial* (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

⁴⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 96.

menjadikan HTI terkubur begitu saja. Pembubaran yang dikeluarkan oleh pemerintah ini kemudian berlanjut pada pengajuan kasasi oleh pihak HTI. Masih ada pro dan kontra mengenai *legal standing*. Pencabutan status badan hukum HTI, kemudian melakukan pengajuan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). HTI menggandeng Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum. Menyiapkan langkah untuk mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dalam rangka menghadapi Perpu. Mahkamah Agung (MA) menolak pengajuan tersebut dan HTI tetap dibubarkan. Melalui Jubir HTI, tindakan pemerintah adalah sikap yang zalim dan sewenang-wenang.

Sidang pengujian terhadap Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) dilaksanakan demi mempertahankan status hukum keberadaan HTI. Penolakan menjadi partai politik di Indonesia dibantah oleh anggota HTI. Untuk menegaskan bahwa HTI bukan partai atau kelompok yang hanya memiliki tujuan politik, dirujuknya salah satu ayat pada surat al-Maidah ayat 56. Didalamnya tersebut "...pengikut (partai/agama) Allah itulah yang pasti menang." Dalam sidang gugatan HTI terhadap Perpu Ormas, terbitnya Perpu tidak dalam keadaan yang mendesak dan dalam situasi yang genting. HTI juga mempermasalahkan pasal yang ada di dalam Perpu Ormas, yakni pasal 59 ayat 4 huruf c sepanjang frasa "menganut", Pasal 61 Ayat 3, Pasal 62, Pasal 80, dan Pasal 82A. Menurut HTI, pasal tersebut inskonstitusional karena diskriminatif.

orang dan membentuk mulai dari satu halaqah. Menjadi Mas'ul HTI di Universitas Indonesia. Menjadi *Mas'ul* dan *Musa'id Mu'tamad* (asisten Ketua DPP HTI) di Babel. Kemudian 2006-2008 merangkap menjadi *Musa'id Mu'tamad* (Asisten Ketua DPP HTI) untuk daerah Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Dalam sejarahnya, di tahun 2010 tanzhim yang Ayik pegang menjadi tanzhim terbaik untuk kategori luar Jawa bagian barat.

Merupakan pemerhati pergerakan Islam transnasional khususnya HTI. Kini aktif di PCNU Kota Bandung dan LDNU PWNU Jawa Barat. Menjadi salah satu mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang banyak menulis artikel tentang HTI. Keluar dari HTI pada akhir April 2011 dikarenakan berbeda pendapat dan melawan DPP HTI. November 2010 Ayik telah keluar dari HTI, namun pada April 2011 dikeluarkan secara resmi dan administrasi melalui pengumuman Ketua Umum HTI. Pengumuman ini dibacakan kepada semua anggota HTI di seluruh Indonesia.

Menjadi penulis artikel di media massa dari tahun 2005. Setelah keluar dari HTI, aktif menghadiri majlis ta'lim sambil aktif diskusi melawan kaum radikal di media sosial. Dibawah bimbingan Amin Baejuri, pada tahun 2018 bergabung dengan Lembaga Dakwah PWNU Jawa Barat. ikut juga dalam kegiatan Madrasah Kader NU (MKNU) dan PKD GP Ansor. Awal 2019

Maksud dan tujuan dari film tersebut, melancarkan serangan halus kepada eksistensi Indonesia dengan memanfaatkan emosi keislaman dan sejarah umat melalui momentum peringatan tahun baru hijriyah. Dengan harapan, timbul ketidakpercayaan publik terhadap legalitas Indonesia secara agama dan sejarah. Sambil mengalihkan perhatian dan kepercayaan umat kepada mereka yang sedang memperjuangkan khilafah tahririyah.

Kedua, modus memframing momentum hari besar adalah modus yang kurang efektif, karena diulang. Hal ini disebabkan karena framing yang sifatnya lemah. HTI sering membuat isu yang tidak berdasar fakta, sifatnya imajinatif, dan *imitative*. *Ketiga*, tema yang diusung dalam film JKDN, diarahkan untuk membenaran perjuangan HTI dalam mendirikan khilafah tahririyah di Indonesia. Perlu diingat bahwa dalam fiqih siyasahnya, HTI hanya mengakui khilafah sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah. Jadi, didalam filmnya, jejak khilafah menurut HTI adalah bekas hubungan diplomatik antara kesultanan di Nusantara (pernah tunduk) dengan Khilafah Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Keempat, fiqih siyasah HTI (khilafah, suatu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan yang bai'at oleh umat setelah dilakukan proses pemilihan secara bebas tanpa paksaan) akan sulit diterapkan di

Indonesia, berbeda dengan perspektif fiqih siyasah Syafi'iyah yang dianut oleh mayoritas ulama di Nusantara:

Suatu negara boleh menggunakan sistem putra mahkota dan umat Islam absah memiliki lebih dari satu orang kepala negara/pemerintahan (khalifah/sultan) pada waktu bersamaan. Maknanya umat Islam boleh hidup, beribadah, beramal di beberapa negara yang berbeda dengan kepala negara/pemerintahan yang berbeda pula.

Mengangkat dua khalifah boleh jika diantara dua khalifah jika jaraknya berjauhan dan terdapat pemisah alami (haajiz thabi'iy) seperti laut, atau ada musuh diantara keduanya, yang tidak mampu dikalahkan oleh salah satu dari keduanya. Ini pendapat Imam Haramain, Al-Ghazali, Abdul Qahir Al-Baghdadi. (Mahmud Abdul Majid Al Khalidi, Qawa'id Nizham Al Hukm fil Islam, hlm. 313; Jamal Ahmad Sayyid Jaad Al Marakbi, Al Khilafah Al Islamiyyah Bayna Nuzhum Al Hukm Al Mu'ashirah, hlm. 65-67).

Sebagai contoh keempat khalifah setelah kepemimpinan Nabi Muhammad, pemilihannya dilakukan menggunakan musyawarah. Keempatnya bahkan tidak melakukan aksi kudeta.

Keempat, HTI menyelewengkan makna khilāfah/imamah dalam kitab-kitab kuning dari nashbul imam menjadi iqamatul nizham.

Kelima, HTI menghubungkan bahwa khilafah tahririyah merupakan khilāfah ‘ala minhajin nubuwwah yang kedua, dan khalifanya pernah menjadi Amir Hizb al-Tahrīr. Sedangkan ulama Aswaja mencapai kesepakatan bahwa Khilāfah Mahdiyah adalah Khilāfah yang dipimpin oleh Imam Mahdi.

Keenam, HTI salah alamat menjadikan Nusantara menjadi wilayah target tegaknya khilāfah ‘alā minhajin nubuwwah yang kedua. Hal ini didukung dengan hadis-hadis yang membahas tentang Imam Mahdi, Dajjal yang menunjukkan makna bahwa lokasi berdirinya adalah di Arab (Syam dan Jazirah Arab).

Ketujuh, kelicikan HTI yang mengopinikan khilāfah secara umum, tanpa adanya perincian bahwa khilāfah yang sedang diperjuangkan merupakan khilāfah tahrīriyah bukan khilāfah mahdiyah.

C. Upaya Kontranarasi Terhadap Propaganda HTI

Tulisan Ayik lahir dari respon, kritik dan jawabannya terhadap jalan radikalisme yang dipropagandakan HTI. Pertanyaannya, mengapa HTI dicap

sebagai organisasi radikal? Anggota HTI selalu mengatakan bahwa organisasinya hanya menyebarkan dakwah, tidak pernah berbuat kekerasan maupun radikal. Ciri radikal yang menonjol terletak pada ideologi yang kuat pada setiap pemikiran simpatisannya, ditandai dengan sikap terlalu mudah mengkafirkan orang lain dan mempunyai pemahaman ekstrim akan jihad. Radikalisme akan lebih parah apabila mengaitkan atas nama agama.

Himpunan berbagai artikel yang ditulis oleh Ayik sebagai kritiknya, tak lain merupakan upaya kontranarasi. Kontranarasi ini sebagai upaya menangkal narasi yang banyak disebar, sebagai upaya pengalihan untuk mencegah individu yang rentan menjadi pengikut HTI dikemudian hari. Hal ini penting dilakukan mengingat setelah HTI dilarang pemerintah, pemahaman dan pemikiran yang disebar masih sama. Tetap menggunakan isu syariah Islam dan khilāfah sebagai ajang propaganda mereka.

Isu syariah dan khilāfah sebagai jalan menutupi ambisi ini, digunakan sebagai alat pencitraan untuk meraih simpati umat. Propaganda Khilāfah HTI yang terus ada, memerlukan penanganan serius berupa kajian komprehensif yang dilakukan pemerintah maupun organisasi masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kadar radikalisme yang tercipta.

Pihak yang berkompeten dalam permasalahan ini, agar ikut dalam memberikan program pencerahan kepada masyarakat. Dengan banyak cara salah

satunya media sosial. Cara seperti ini, lebih efektif dan bisa diakses oleh kaum muda sekalipun.

Pada dasarnya, web online merupakan tempat banyak informasi disebar. Mulai dari web Islam, politik, hukum, ekonomi, olahraga, teknologi, kesehatan dan segala hal bisa di sebar melalui web online. Lebih besar kemungkinan untuk diakses oleh banyak masyarakat karena topik hangat akan bermunculan di situs online. Tak terkecuali pemahaman agama, banyak sekali permasalahan sehari-hari yang solusinya kemudian dirujuk ke situs online. Beberapa web Islam, menjadi tujuan untuk rujukan pemahaman.

Banyak juga aliran-aliran yang melatarbelakangi pemikiran sebuah web Islam. Dalam arti, ada alasan sebuah ideologi berada dalam satu pendirian suatu web online. Hingga suatu berita, artikel, features, opini yang terbit, dapat ditelusuri apa ideologi yang digunakan. Dengan hadirnya artikel yang lahir dari kritik mantan ketua HTI Bangka Belitung ini, diharapkan masyarakat juga dituntun untuk *melek* terhadap isu-isu khilāfah dan banyaknya bentuk propaganda akan arah radikalisme Islam.

Propaganda yang dilancarkan HTI secara umum meliputi banyak bidang, termasuk diantaranya dalam bidang partai politik di Indonesia HTI bersanding dengan PKS (Partai Keadilan Sejahtera). PKS sebagai penggerak utama yang

menyerukan dan menggaungkan politik identitas dengan aturan berbau agama.⁶¹ Dalam bidang pendidikan, salah satu contoh secara *clandestinely* (gerakan bawah tanah) HTI masih mengajarkan dan menyebarkan ideologi khilafah islamiyah. Bertempat di yayasan pendidikan Al-Hamidy al-Islamiyah, desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Pasuruan.⁶²

D. Norman Fairclough: Biografi dan Karya

Norman Fairclough lahir pada 3 April 1941 merupakan Profesor emeritus Departemen Linguistik di Universitas Lancaster. Ia merupakan salah satu pencetus analisis wacana kritis, cabang sosiolinguistik yang melihat pengaruh relasi kuasa terhadap isi dan struktur tulisan. AWK fokus bagaimana kekuasaan dijalankan melalui bahasa. AWK mempelajari wacana yang didalamnya termasuk teks, video, percakapan, dan ceramah. Pemikiran Fairclough dipengaruhi dari teori beberapa tokoh seperti Mikhail Bakhtin dan Michael Halliday dalam linguistik, Antonio Gramsci, Louis Althusser, Michel Foucault dalam teori ideologi, dan Pierre Bourdieu dalam teori sosiologi.⁶³

Buku dan karya tulisnya yang dipublikasi meliputi,⁶⁴ Fairclough, Norman (1989). *Language and Power*. London: Longman. Fairclough, Norman (1992).

⁶¹ Ronaldy, "Prabowo Memasukkan Kader PKS-HTI-ISIS DI BUMN Pertahanan? Berbahaya" - Nawacita (nawacitapost.com), diakses pada 28 Mei 2021.

⁶² Tim Harakatuna, "Banser dan Infiltrasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Indonesia" | Harakatuna.com, diakses pada 28 Mei 2021.

⁶³ Google Scholar, norman fairclough - Google Cendekia, diakses 20 Juli 2021.

⁶⁴ Lihat, Norman Fairclough | Lancaster University - Academia.edu, diakses 20 Juli 2021.

membantu peneliti memaknai teks, produksi teks, dan konteks dari teks yang dihasilkan. Sebagaimana dalam lapangan komunikasi, bahasa tidak bebas digunakan, pemakai bahasa menyesuaikan dengan praktik diskursif di tempat manakah keberadaannya. Bentuk teks berita dalam beberapa macam tersebut termasuk dalam pendisiplinan wacana. Perbedaan dalam praktik diskursif akan menghasilkan struktur yang berbeda juga dalam pemilihan kosakata, kalimat, atau kutipan.

Sedangkan empat langkah metodologi AWK itu meliputi: (1) Memfokuskan pada “ketidakberesan sosial” dalam aspek semiotiknya. (2) Mengidentifikasi hambatan-hambatan untuk menangani “ketidakberesan sosial” itu. (3) Mengidentifikasi siapa yang diuntungkan sehingga menghendaki ketidakberesan sosial itu. (4) Mengidentifikasi cara-cara yang memungkinkan untuk mengatasi hambatan-hambatan.

sesungguhnya Nabi Muhammad telah wafat dan urusan agama ini harus ada yang mengurusnya”. Hingga para sahabat bersepakat untuk mencari pengganti Nabi yang akan menjaga agama dan menjalankan urusan dunia. Akhirnya, para sahabat sepakat untuk memilih Abu Bakar sebagai Khalifah pertama setelah ditinggal oleh Rasulullah untuk mengatur Negara yang disebut Khilafah Islamiyah. Negara Khilafah dibawah kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali berkembang sangat cepat. Wilayah Negara Khilafah mendominasi dua negara adi daya saat itu, yakni kekaisaran Persia dan Imperium Romawi. Adapun politik luar negerinya adalah dakwah dan jihad.

Dengan munculnya negara adi daya baru yang bernama Khilafah Islamiyah di Timur Tengah, jauh di sebelah timur terbentang pulau dengan kekayaan alam yang melimpah baik di laut dan darat. Negeri yang indah itu bernama Nusantara. Letak yang strategis, menjadikannya sebagai pelabuhan dagang yang ramai. Akhirnya, pengaruh Islam sampai di Nusantara salah satunya karena perdagangan kaum muslim yang pesat. Keberlanjutan hubungan diplomatic dan komersial dari India ke Cina berlangsung hingga kepemimpinan Bani Umayyah.

Awal mula jejak Khilafah menurut film JKDN, utusan khilafah akan melalui Nusantara dengan adanya kegiatan transit di Pulau Ujung Barat Nusantara yakni Sribusa, sebutan Kerajaan Sriwijaya dalam Bahasa Arab. Lantas, penguasa Sriwijaya menyadari adanya para pedagang muslim diwilayahnya juga menyebarkan dakwah Islam. Diketahui pula bahwa Raja Sri Indrawarman dari

Sriwijaya bersurat ke Damaskus, Ibu Kota Khilafah Umayyah yang pada saat itu dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam surat itu diketahui bahwa dalam kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, Khilafah menyebarkan Rahmatan lil 'alamin ke seluruh penjuru dunia, termasuk Nusantara.

Setelah itu, keturunan Khilafah Abbasiyah yakni Shadrul Akabir Abdullah al-Abbasiyah datang ke Nusantara. Sultan Zainal Abidin penguasa Pasai waktu itu berbaiat kepada Khalifah al-Mutawaqqil di Kairo. Dengan begitu, Samudera Pasai mendaulatkan diri sebagai Darul Islam dan berbaiat kepada khalifah. Keturunan Abbasiyah yakni Shadrul Akabir Abdullah al-Abbasiyah, juga istrinya Siti Rohimah dan putrinya Yusuf dimakamkan di Aceh. Samudera Pasai dibawah kepemimpinan Sultan Zainal dibantu putranya Yusuf berhasil menundukkan wilayah Sumatera dan Semenanjung Malaya. Kemudian, putra Sultan Zainal yakni Sultan Mansur menjadi penguasa di Darul Islam Malaka. Dengan begitu mereka juga mengirimkan juru dakwahnya untuk meminta penguasa-penguasa Nusantara lainnya agar menerima Islam.

Syaikh Maulana Malik Ibrahim yang merupakan salah satu juru dakwah, dikirim ke Gresik yang kemudian dikenal dengan Sunan Gresik. Dengan begitu, yang berinisiasi tegaknya Islam di tanah Jawa adalah Sunan Gresik, dan para pengemban dakwah di Jawa dikenal dengan walisongo. Dari Gresik, dakwah walisongo menyebar ke kota lain dan juga keluar Jawa termasuk Ternate, Maluku, Makassar, Kalimantan, dan kota lainnya.

1. Mereka memaknai jejak khilafah sebagai khilafah itu sendiri. Seolah-olah Khilafah Umayyah, Abbasiyah dan Usmaniyah pernah tegak di Nusantara. Karena itu wajib ditegakkan kembali. Pemahaman ini sangat keliru, irasional, dan tidak logis; Sebab, jejak adalah bekas, tilas dan tanda yang menunjukkan keberadaan sesuatu, tapi bukan sesuatu itu sendiri. Jejak khilafah bukan khilafah itu sendiri. Jejak khilafah di Nusantara justru menunjukkan tidak ada eksistensi Khilafah Umayyah, Abbasiyah dan Usmaniyah di Nusantara.
2. Jejak Khilafah yang ditampilkan oleh film tersebut berupa surat, bantuan tenaga pengajar agama Islam dan bantuan militer dari Khilafah Umayyah, Abbasiyah dan Usmaniyah kepada kesultanan-kesultanan di Nusantara dimaknai oleh aktivis HTI sebagai futuhat dan penaklukan khilafah terhadap kesultanan-kesultanan di Nusantara. Hubungan kerjasama antar negara dianggap sebagai futuhat dan penaklukan. Padahal jejak-jejak itu menunjukkan hubungan diplomatic antar negara yang lazim di dalam hubungan internasional.

Rasulullah Muhammad saw sebagai kepala negara Madinah pernah mengirim surat ke raja Najasyi, Romawi, Persia, Muqauqis dan kerajaan lainnya. Surat-surat dan delegasi yang dikirim Rasulullah saw merupakan jejak-jejak negara Madinah di kerajaan tujuan. Apakah dengan surat-surat dan delegasi tersebut menjadikan kerajaan-kerajaan tadi tunduk, bergabung dan menjadi bagian integral negara Madinah?!

Rasulullah saw juga pernah menerima hadiah dua orang jariah pakaian-pakaian dan seekor bughlah (keledai) sebagai kendaraan engkau dari Raja

Beberapa poin pengetahuan dalam artikel ini diantaranya: *pertama*, HTI kembali dengan menyamar dengan berbagai nama seperti: Shautul Ulama, Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa, LBH Pelita Umat, Gema Pembebasan, BKLDK, dan masih banyak lagi. *Kedua*, upaya mendirikan Khilafah Tahriyah melalui pembenaran lewat sejarah:

Setelah tidak menemukan satu pun ayat dan hadits yang menjanjikan Khilafah Tahriyah akan tegak di Indonesia, mereka coba mencari pembenaran dari sejarah. Mereka memproduksi film Jejak Khilafah di Nusantara. Metode ini sebenarnya bertentangan dengan doktrin Hizbut Tahrir yang tidak menjadikan sejarah sebagai dalil. Tapi bukan HTI namanya, kalau tidak menjilat ludah sendiri.

Ketiga, terdapat beberapa kesesatan nalar HTI terhadap film JKDN meliputi: pemaknaan “jejak khilafah” sebagai khilafah itu sendiri; bantuan tenaga dari Khilafah Umayyah, Abbasiyah dan Usmaniyah kepada kesultanan-kesultanan Nusantara dianggap sebagai futuhat dan penaklukan; aktivis HTI menjadikan jejak-jejak khilafah di Nusantara sebagai dalil historis akan tegaknya kembali khilafah di wilayah Indonesia. Keempat, Kemustahilan tegaknya Khilafah Tahriyah di Nusantara diperkuat oleh hadis-hadis Nabi saw tentang *khilafah ‘ala minhajin nubuwwah* yakni Khilafah Mahdiyah yang akan berdiri di Arab.

terjadi dalam masa lampau, ilmu sejarah. *Nusantara*, menurut KBBI adalah sebutan (nama) bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Menggambarkan seluruh kepulauan yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. *HTI*, adalah Hizbut Tahrir di Indonesia. Sebuah organisasi politik yang memperjuangkan berdirinya Khilāfah Islamiyah dengan berbagai upaya dibelakangnya. *Produksi*, memiliki arti proses mengeluarkan hasil, penghasilan. *Film* dalam KBBI mempunyai arti, lakon (cerita) gambar hidup. *Propaganda*, memiliki arti penerangan (paham, pendapat, dan sebagainya) yang benar atau salah yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang menganut suatu aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu. Sedangkan *politik*, dalam KBBI berarti (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sisten pemerintahan, dasar pemerintahan), segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijakan.

Langkah kedua dalam menganalisis teks adalah *representasi dalam kombinasi anak kalimat*. Analisis ini menampilkan bagaimana dua fakta ditampilkan didalam teks. Apakah penulis menggabungkan dua fakta tersebut, atau memisahkannya. Hal ini dapat dilihat dengan menggunakan analisis berikut. Fakta pertama, “Bajak Sejarah Nusantara”, fakta kedua, “HTI Produksi Film Propaganda Politik.” Dua fakta ini dapat digabung dalam pengertian “HTI

Penggabungan antara kalimat fakta pertama dan kedua, akan membentuk koherensi lokal, dalam pengertian, antara anak kalimat satu dengan yang lainnya membentuk suatu arti tertentu. Koherensi ini nantinya, akan menjawab problem mengenai ideologi yang ditampilkan dalam teks. Dalam artikel tertulis “Setelah tidak menemukan satu ayat pun dan hadits yang menjanjikan Khilāfah Tahririyah akan tegak di Indonesia, mereka mencari pembenaran dari sejarah.” Kedua fakta ini kemudian digabung sehingga membuat asosiasi kepada khalayak bahwa status HTI yang menggantungkan dirinya kepada ayat dan hadits pun harus selesai. Dalam pembuktian yang lebih lanjut, HTI mencari pembenaran melalui sejarah. Koherensi antara anak kalimat ini termasuk kedalam bentuk perpanjangan kontras, dimana kalimat selanjutnya menjadi perpanjangan anak kalimat yang lain. Juga, melanjutkan anak kalimat pertama. Ayik menulis memakai dan memaknai antar anak kalimat sehingga tercipta suatu pengertian. HTI dianggap menjadi organisasi yang salah kaprah karena memaksakan hadis dan ayat Alquran untuk mencapai sesuatu yang bahkan bukan perkara wajib.

Representasi dalam rangkaian antar kalimat, aspek ini berhubungan dengan bagaimana dua kalimat atau lebih dirangkai. Aspek penting partisipan akan berpengaruh dalam representasi ini. Misalnya HTI Dalam kalimat ini “Aktivitas Hizbut Tahrir di Indonesia (HTI) terus melawan. Mereka terus bergerak. Belum menyerah kalah. Meski perjuangan mereka salah alamat, tidak

berdasar kepada dalil dan argumetasi yang kuat, kegigihan mereka patut diacungi jempol terbalik. Mereka istiqamah di jalan yang salah.”

Dua kalimat atau lebih yang disusun dan dirangkai, pasti memiliki kalimat yang menonjol dibanding dengan bagian yang lain. Kalimat “meski perjuangan mereka salah alamat, tidak berdasar kepada dalil dan argumentasi yang kuat.” Kalimat ini menonjol dengan pengertian HTI berdiri berdasar dalil yang lemah, sehingga memungkinkan gerakan ini salah alamat. Klaim penegakan khilafah menurut HTI, menjadi perintah agama yang sekarang banyak diabaikan oleh mayoritas kaum muslimin. Usaha dalam menunjukkan dalil khilafah, surat al-Baqarah ayat ke 30 menjadi landasan. Kemudian hadis yang menjadi landasan handal HTI adalah hadis riwayat Ahmad nomor 18.406 yang derajatnya adalah hasan.

Kegagalan HTI yang terus menerus dalam mencapai pendirian khilafah, konsep di atas kertas yang mustahil diwujudkan dalam sistem politik modern berbasis *nation-state*, menjadi salah satu penyebabnya. HTI terus beraktivitas dan terus melawan bahkan setelah resmi menjadi organisasi terlarang. HTI bahkan memohon dan menggugat atas pencabutan status badan hukumnya ke PTUN. Mekanisme yang seperti itu bahkan disediakan demokrasi dan menjadi cacian sekaligus dinikmati oleh HTI.

Aspek selanjutnya mengenai *relasi*, adanya partisipan dalam media seperti wartawan, khalayak media, dan partisipan publik. Ini merupakan

analisis hubungan, bagaimana pola hubungan diantara ketiga aktor tadi ditampilkan dalam teks. Dalam teks ini Ayik sebagai bagian dari wartawan, sekaligus sebagai contoh bagian dari partisipan publik, dan khalayak media. Seluruh analisis hubungan diamati dari teks.

Dan yang terakhir mengenai analisis teks adalah analisis identitas. Bagaimana identitas wartawan (Ayik) ditampilkan dan dikonstruksikan dalam teks pemberitaan. Bagaimana ia mengidentifikasi dirinya? Dari kelompok mana? Apakah wartawan ingin mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari HTI atau sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang tidak setuju khilafah tegak di Indonesia. Identifikasi dapat dilihat dalam teks berikut:

Setelah tidak menemukan satu pun ayat dan hadits yang menjanjikan Khilafah Tahririyah akan tegak di Indonesia, mereka coba mencari pembenaran dari sejarah. Mereka memproduksi film Jejak Khilafah di Nusantara. Metode ini sebenarnya bertentangan dengan doktrin Hizbut Tahrir yang tidak menjadikan sejarah sebagai dalil. Tapi bukan HTI namanya, kalau tidak menjilat ludah sendiri.

Relasi antara Ayik dengan HTI tidak baik-baik saja. Kalimat ini menampilkan Ayik dalam mengidentifikasi dirinya di tengah berbagai faktor sosial yang terlibat. Wartawan mengidentifikasi dirinya sebagai rakyat Indonesia yang turut menolak berkembangnya pemikiran-pemikiran HTI. Dalam kalimat penutupnya, Ayik juga menyatakan sebagai berikut:

Film Jejak Khilafah di Nusantara menunjukkan HTI miskin nalar dan narasi. Tidak mengandung nilai ilmiah. Film ini membajak

sejarah Nusantara sebagai propaganda politik yang realitasnya hanya disantap oleh syabab-syabab mereka sendiri.

Dari judul, didapat pengertian sebagai berikut: Film merupakan objek yang digunakan oleh pihak HTI sebagai alat propaganda politik. HTI sebagai pihak yang memproduksi dan merealisasikan film sebagai bentuk propaganda khilāfah. Bajak sejarah nusantara, sebagai aksi ambil alih secara paksa sejarah kesultanan di Nusantara, sebagai bentuk pewujudan film Jejak Khilāfah di Nusantara (JKDN). Politik, sebagai basis dari pergerakan HTI untuk tetap jihad mendirikan negara Islam yang berideologi khilāfah ala HTI. Tidak menggunakan cara kasar, HTI lebih memilih mengedukasi khilāfah kepada masyarakat lewat film.

Film merupakan media komunikasi modern yang efektif untuk menghibur sekaligus menyampaikan pesan yang dapat mempengaruhi sikap, pola pikir, dan membuka wawasan bagi para penonton. Kewaspadaan kita sebagai masyarakat awam adalah mewaspadaikan dan memantau setiap film yang tayang. Disebabkan ketidaktahuan kita terhadap siapa saja yang ada di belakang pembuatan film tersebut. Yang ditakutkan bersama, adalah para pengasong paham khilāfah masuk menyebarkan ideologi tersebut melalui sebuah film.

Poin-poin penting dalam artikel yang ditampilkan antara lain: pertama, kegigihan HTI yang belum menyerah kalah. Kedua, nama-nama samaran HTI di berbagai elemen masyarakat. Ketiga, penyamaran HTI yang mudah disingkap, karena narasi dan diksi sama ketika sebelum dibubarkan.

Keempat, mencari pembenaran lewat sejarah, dengan memproduksi film JKDN. Metode yang sebenarnya bertentangan dengan doktrin HTI, untuk tidak menjadikan sejarah sebagai dalil. Kelima, beberapa nalar sesat HTI dibalik film JKDN. Keenam, film JKDN dianggap sebagai karya dengan pembajakan sejarah Nusantara.

Karena berita perilisan film viral di berbagai media sosial, maka situasi menjadi ramai akan pembicaraan film tersebut. Mengingat khilāfah sangat dekat dengan HTI, dan HTI tidak lepas dari propaganda khilāfah. Walaupun pastinya HTI tidak secara terang-terangan mengaku memproduksi film, namun kritikus dan pengamat akan mengetahui bahwa itu merupakan tindakan propaganda ala HTI. Situasi yang tergambar dalam teks berupa kritikan terhadap HTI karena masih melakukan propaganda khilāfah, kali ini melalui film. Tak hanya itu, HTI menyamar dengan berbagai nama samaran di berbagai elemen kemasyarakatan. Teks tersebut juga menyampaikan beberapa nalar sesat HTI yang dituangkan dalam film JKDN.

Wacana yang dikembangkan dalam artikel ini, terdapat beberapa salah nalar dari kalangan aktivis HTI terkait jejak Khilāfah Umayyah, Abbasiyah, dan Usmaniyah di Nusantara. HTI digambarkan salah memaknai jejak khilāfah. Yang mereka pahami, jejak khilāfah sebagai khilāfah itu sendiri. Seolah-olah Khilāfah Umayyah, Abbasiyah, dan Usmaniyah pernah tegak di Nusantara, karena itu wajib ditegakkan kembali. Dalam teks digambarkan

bahwa pemahaman HTI yang sangat keliru, irasional dan tidak logis. Kekeliruan pemahaman itu seperti disebabkan adanya ego yang tinggi agar khilāfah tegak kembali di Nusantara. Lebih lanjut dijelaskan dalam teks, bahwa “jejak” adalah bekas, tilas, dan tanda yang menunjukkan keberadaan sesuatu. Namun bukan sesuatu itu sendiri. Jejak Khilāfah di Nusantara justru menunjukkan tidak ada eksistensi Khilāfah Umayyah, Abbasiyah, dan Usmaniyah di Nusantara.

Kesesatan nalar selanjutnya yang ditampilkan dalam teks adalah: jejak khilāfah yang ditampilkan oleh film tersebut berupa surat, bantuan tenaga pengajar agama Islam, dan bantuan militer dari Khilāfah Umayyah, Abbasiyah dan Usmaniyah. Bantuan tersebut dikirim kepada kesultanan di Nusantara dan dimaknai oleh aktivis HTI sebagai futuhat dan penaklukan khilāfah terhadap kesultanan-kesultanan di Nusantara. Hubungan kerjasama antar negara dianggap sebagai futuhat dan penaklukan. Padahal jejak-jejak itu menunjukkan hubungan diplomatik antar negara yang lazim di dalam hubungan internasional. Kemudian, aktivis HTI menjadikan jejak-jejak Khilāfah di Nusantara sebagai dalil historis akan tegaknya kembali Khilāfah di Indonesia. Dalam teks juga dituliskan bahwa mustahil Khilāfah Tahririyah di Nusantara bisa tegak. Kemustahilan ini didukung dengan hadis Nabi saw tentang khilāfah ‘alā minhajin nubuwwah yaitu Khilāfah Mahdiyah yang akan berdiri di Arab.

Secara umum teks artikel ini menggambarkan bagaimana kekeliruan HTI terhadap sebuah film khilāfah yang akan dipromosikan kepada khalayak di Indonesia. Pergerakan HTI itu dapat dilihat dari bagaimana HTI direpresentasikan dalam teks. HTI dilabeli dengan pergerakan yang salah alamat, tidak berdasar kepada dalil dan argumentasi yang kuat, miskin nalar dan narasi, istiqomah di jalan yang salah, “menjilat ludah sendiri”, dan pantas mendapatkan dua jempol terbalik karena kegigihannya yang salah. Kata-kata semacam ini seolah mengasosikan kesalahan pada HTI semata. Seluruh teks seolah menimpakan kesalahan semata kepada HTI. Namun dibalik kalimat-kalimat itu, ada narasi logika yang mencoba menyadarkan untuk tidak ikut terpengaruh dengan propaganda khilafah HTI.

Propaganda yang dilakukan HTI direpresentasikan memiliki makna suatu usaha yang bersifat konsisten dan terus menerus untuk menciptakan atau membentuk peristiwa-peristiwa, guna mempengaruhi hubungan publik terhadap pemerintah. Bahwa Indonesia belum sah apabila tidak menerapkan khilāfah. Khalayak pembaca bisa bertanya-tanya, bagaimana mungkin film JKDN membawa propaganda politik? Walaupun begitu, harus diketahui bahwa propaganda menjadi salah satu bentuk komunikasi massa yang digunakan untuk menyebarkan suatu keyakinan atau doktrin. Dalam usahanya, bersifat persuasif (membujuk secara halus) supaya seseorang yang dibujuk menjadi yakin. Sifat yang persuasif ini dapat ditemukan dimana saja, seperti iklan,

menarik para tokoh sipil dan hukum. Melalui Gema Pembebasan dan BKLDK, menyerap simpati para mahasiswa. Beberapa contoh nyata yang dipastikan memiliki hubungan dengan para simpatisan HTI. Dengan penyebaran yang serentak semacam itu, khalayak seperti diberi pesan bahwa HTI bukan organisasi yang menyerah begitu saja. HTI sejak didirikannya memang sangat lihai menjadi *underground organization*.

Dalam teks, HTI diumpamakan seperti menjilat ludah sendiri. Ini merupakan peribahasa yang diungkapkan ketika seseorang menarik atau mengambil kembali sesuatu yang pernah diungkapkan/diberikan kepada orang lain. Sebenarnya, HTI tidak diperbolehkan menjadikan sejarah sebagai dalil. Namun yang terjadi, HTI malah memproduksi film *documenter* sejarah “Jejak Khilafah di Nusantara”. Metode seperti inilah yang kemudian dikritik oleh Ayik. Kritikan tajam Ayik seakan ingin menunjukkan bahwa masyarakat awam harus berhati-hati dengan sifat propaganda politik HTI yang semakin hari tak pernah surut. Kemudian ketika HTI menargetkan Indonesia sebagai negara Islam tempat berdirinya Khilāfah, adalah salah. Karena hadis Nabi menunjuk Arab, bukan Indonesia. Kritik Ayik mengenai HTI istiqamah di jalan yang salah, benar bila dikaitkan dengan hadis tersebut.

Wacana yang digambarkan, dapat dilihat bagaimana *relasi* yang hendak dibangun dalam teks. Teks artikel ini menyertakan beberapa pihak yang saling berhubungan. Antara lain aktivis HTI, Shautul Ulama, Forum Doktor

Muslim Peduli Bangsa, LBH Pelita Umat, Gema Pembebasan, BKLDK. Mereka berkaitan satu sama lain. Dalam teks dijelaskan bahwa pergerakan HTI yang tanpa lelah itu tetap menjalankan dakwah mereka dengan nama organisasi samaran tersebut. Dalam teks disebut ada pihak pengajar agama Islam, merupakan bantuan tenaga dari pihak Khilafah Umayyah, Abbasiyah, dan Usmaniyah kepada kesultanan Nusantara. Lalu oleh aktivis HTI dianggap sebagai penaklukan khilafah terhadap kesultanan di Nusantara.

Masih berkaitan dengan relasi, adalah *identitas* pihak-pihak yang diberitakan dalam teks. Teks tersebut menggambarkan bagaimana pembaca diletakkan dalam posisi masyarakat dan bukan pada posisi HTI. Teks yang dihadirkan oleh Ayik tidak menyugestikan kepada masyarakat untuk terbawa arus propaganda politik khilafah. Teks itu justru memposisikan pembaca agar sadar bahwa HTI merupakan organisasi yang cukup berbahaya. Oleh karena itu, dalam teks berita dari awal hingga akhir berisi tentang kritikan terhadap langkah-langkah HTI yang salah. HTI menjadi musuh bersama bukan hanya pemerintah, namun juga masyarakat yang menjaga keutuhan NKRI.

Semua elemen yang dianalisis tersebut dipakai untuk melihat tiga masalah yaitu ideasional, relasi, dan identitas. Dalam hal *ideasional*, ada muatan ideologis tertentu yang dibawa. Dalam teks, perdebatan kembalinya ideologi yang dibawa HTI berupa gagasan penegakan khilafah untuk menggantikan keutuhan ideologi Indonesia. Dalam hal *relasi*, teks disampaikan secara informal. Ini menunjukkan konstruksi hubungan antara penulis dengan

pembaca. Ayik ingin memberikan *setting* kedekatannya sebagai mantan organisasi kepada pembaca. Kesadarannya sampai pada kegagalan dalam mengikuti jejak pemikiran HT. Segala kritik, berusaha menyadarkan pembaca awam sekalipun agar jangan sampai jatuh pada jurang yang sama. Sedangkan dalam hal *identitas*, merujuk pada konstruksi tertentu dari identitas wartawan dan pembaca. Identitas Ayik dan personalnya sebagai wartawan.

2. *Discourse Practice*

Mengidentifikasi kecenderungan pemberitaan dalam kasus-kasus tertentu. Bagaimana menjelaskan sikap dan perilaku dominan media dalam setting ketika pemerintah telah melarang organisasi HTI beroperasi. Apakah media menampakkan perubahan yang signifikan dalam menafsirkan berbagai realitas dan isu yang berkembang di masyarakat, khususnya mengenai propaganda HTI dan kaitannya dengan film JKDN.

Faktor yang menentukan peristiwa apa saja yang bisa atau tidak bisa ditampilkan dalam pemberitaan, harus putar balik untuk melihat latar belakang bahwa media pada era reformasi ini dapat bebas mengembangkan model pemberitaan sesuai dengan keinginannya. Bebas, dengan syarat bahwa media menjadi otonom dan mandiri.

Teks artikel melibatkan praktik diskursus yang rumit dan kompleks. Praktik wacana inilah yang menentukan bagaimana teks tersebut dibentuk. Fairclough memandang ada dua sisi dalam praktik diskursus, yakni produksi

memarjinalkan suatu kelompok bisa jadi lahir dari suatu proses produksi berita yang melibatkan struktur yang timpang.

Artikel yang ditulis oleh Ayik Heriansyah secara keseluruhan merupakan kritiknya terhadap HTI. Jadi, alasan marjinalisasi ini lahir dari suatu proses produksi berita yang bisa dikatakan, berstruktur timpang. Hal ini memang sangat terlihat dalam banyak artikel yang terbit, memang dikhususkan untuk menanggulangi maraknya gerakan radikalisme-terorisme. Ayik dan media hadir untuk memerangi narasi wajah pengusung gerakan yang hendak mengganti ideologi negara dengan memanfaatkan dalil agama, yang nantinya menjadikan masyarakat menjadi resah.

Dari hasil penelitian mengenai sampel media harakatuna.com dan Ayik Heriansyah, menunjukkan sebagai berikut: pertama, sisi individu dari Ayik Heriansyah. Sebagaimana dikatakan di bab awal, Ayik merupakan mantan anggota HTI. 10 tahun berada di HTI, termasuk menjadi bagian internal selama 7 tahun dengan jabatan ketua HTI di Provinsi. Mengadopsi segala yang berkaitan dengan HT berupa pemikiran, analisa politik, opini hukum fiqih, dan aturan administrasi organisasi. Diadopsinya segala hal yang disebutkan tanpa memandang apakah besar atau kecil, sedikit atau banyak, baik atau buruk, valid atau hoax, masuk akal atau tidak. Berdasarkan pengalamannya, Ayik paham betul apa saja propaganda yang dilakukan oleh HTI. Setelah ia keluar dari HTI, mulai tahun 2005 menjadi kontributor artikel di beberapa situs web online.

Sebagai pemerhati gerakan Islam transnasional, Ayik menjadi mantan HTI yang banyak menulis artikel tentang HTI dan beberapa karyanya dibukukan. Aktif menghadiri majlis ta'lim sambil aktif diskusi melawan kaum radikal di media sosial. Awal 2019 menjadi ketua Lembaga Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Kota Bandung.

Kini menjadi Direktur Eksekutif *Center for Narrative Radicalism and Cyber Terrorism* (CNRCT) pusat studi yang fokus terhadap kajian narasi-narasi radikalisme dan *cyber terrorism*. Lembaga ini bertujuan meminimalisir penyebaran paham radikalisme dan terorisme siber yang banyak beredar di masyarakat baik secara daring maupun luring. CNRCT menjadi jalan solusi dan alternatif narasi atas narasi dan wacana yang diproduksi oleh kelompok radikal-teroris. Tak hanya itu, Ayik menjadi kontributor media online *nu.or.id*, *dutaislam.com*, *Itnnujabar.or.id*, *pecihitam.org*, *laduni.id*, *iqra.id* dan menjadi narasumber diskusi, seminar, bedah buku tentang HTI, radikalisme dan gerakan radikal dari tahun 2016 hingga sekarang. Pun menjadi Gugus Tugas Pemuka Agama BNPT dan anggota Lembaga Pentashih Buku dan Konten Islami MUI Pusat dari tahun 2020.

Kedua, bagaimana hubungan antara wartawan dengan struktur organisasi media. Bagaimana hubungan dengan sesama anggota redaksi, maupun dengan bidang lain dalam satu media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ayik Heriansyah menjadi kontributor di harakatuna. Bekerjasama juga

dengan kontranarasi khilafatisme yang diusung oleh HTI dengan propaganda utamanya, pendirian Negara Khilafah Islamiyah. Harakatuna berpandangan bahwa akar persoalan radikalisme agama di Indonesia adalah kuatnya keinginan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Sembari memprovokasi umat Islam, dengan mendakwahkan bahwa NKRI adalah taghut dan kafir. Dan mendukung negara taghut seperti Indonesia adalah bentuk lain dari kekafiran itu sendiri. Harakatuna memfokuskan diri pada tiga gerakan utama kontra radikalisme-terorisme; 1. Kontranarasi, 2. Kontra-ideologi, 3. Kontra-propaganda. Terhadap tiga gerakan tersebut, Harakatuna telah melakukan pelbagai kegiatan antara lain: Halaqah kepesantrenan yang melibatkan para tokoh pesantren lintas organisasi masyarakat. Agar terlibat aktif memberikan pencerahan pada masyarakat akan bahaya paham radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Dialog kebangsaan dan keislaman yang melibatkan para pakar dan akademisi di jaringan kampus se-Indonesia. Dengan tujuan utama membentengi mahasiswa dari penyebaran paham radikalisme-terorisme. Pendirian pustaka Harakatuna sebagai gerakan literasi berbasis ilmiah dan akademik dengan fokus utamanya pada tema-tema yang mengarah pada penguatan pilar-pilar kebangsaan dan keislaman. Produk Pustaka Harakatuna berupa terselenggaranya diskusi dan bedah buku yang diselenggarakan di kampus pesantren dan tempat umum lainnya.

Pembuatan website Harakatuna.com adalah upaya nyata dalam memberikan pencerahan dan penguatan narasi kebangsaan dan keislaman sekaligus sebagai media kontranarasi radikalisme-terorisme, berbasis online melalui ulasan standar ilmiah yang sangat tinggi. Dengan melibatkan para penulis muda lintas kampus dan lintas daerah di Indonesia bahkan luar negeri.

Penyebaran buletin Jum'at Harakatuna dengan melibatkan para pengurus masjid di kota-kota besar di Indonesia. Buletin Jumat dipersiapkan secara khusus sebagai alternative bacaan umat Islam di tengah merebaknya bulletin Jumat yang mengusung tema yang mengarah pada perlawanan eksistensi negara-bangsa dan indoktrinasi paham radikal dan fundamental.

Pelatihan jurnalistik santri dan siswa sebagai jawaban atas dominannya konten yang mengarah pada indoktrinasi paham dan ideologi radikalisme-terorisme di dunia maya. Generasi muda harus disiapkan bekal yang cukup untuk berdakwah di dunia maya, dengan konten positif dan mencerahkan umat Islam secara keseluruhan.

Pembuatan meme, video, dan ceramah pendek merupakan usaha lain dalam mempromosikan Islam yang rahmatan lil-'alamin. Dan moderasi beragama dengan pilihan konten yang unik, kreatif dan mencerdaskan. Mari bersama-sama menjadikan Harakatuna sebagai gerakan bersama dalam memberikan penyadaran dan pencerahan. Bahwa keberagaman puncaknya adalah keberagaman dan puncak dari keberagaman adalah kemanusiaan.

Perdamaian dan kedamaian adalah pesan utama dalam Islam. Dan Islam melarang segala bentuk kekerasan atas nama agama.

3. *Sociocultural Practice*

Konteks sosial yang berada di luar media menjadi salah satu perhatian khusus pada AWK model Fairclough. Ruang redaksi atau penulis bukanlah sesuatu yang steril. Pengaruh bagaimana kemudian wacana muncul dalam berita ini yang kemudian dikategorikan sebagai praktik sosiokultural. Tidak berhubungan langsung, namun menentukan bagaimana teks diproduksi.

Perlu diketahui terlebih dahulu, ada beberapa jawaban yang akan menjadi jawaban mengapa propaganda ini berbentuk film. Latar belakang masyarakat Indonesia yang sangat senang dengan *audio visual* (gambar hidup yang dapat dilihat dan didengar termasuk didalamnya film, video, dan sebagainya) sejajar dengan adanya film JKDN. Tulisan tidak secara menyeluruh menjangkau lapisan masyarakat bersamaan dengan budaya membaca yang lemah. Target masyarakat yang lebih menyukai kegiatan menonton video, hingga televisi, memungkinkan angka penyebaran pemikiran dan kegiatan propaganda politik melalui film. tersebarnya film dengan perantara media online menjadi jalan praktis. Menghubungkan pesan komunikasi dari pendakwah kepada masyarakat, sebagai objek dakwahnya.

Fairclough membuat tiga level pada sub bab praktik sosiokultural ini. *Pertama*, situasional. Lebih mengarah pada waktu atau suasana yang mikro (konteks peristiwa saat teks berita dibuat). Menelusuri bagaimana sebuah teks dihasilkan dalam suatu kondisi yang khas, unik, sehingga suatu teks bisa jadi berbeda dengan teks yang lain. Setiap peristiwa dibalut dengan konteks situasional yang melibatkan emosi dan nuansa tertentu.

Wacana yang dikembangkan dalam teks ini adalah modus HTI dalam mem*frame* momen hari besar Islam, pada 1 Muharram diluncurkannya film *Jejak Khilafah di Nusantara*. HTI (yang telah dicabut badan hukumnya oleh pemerintah di tahun 2017) digambarkan sebagai salah satu organisasi yang melancarkan serangan halus kepada eksistensi Indonesia. Tujuannya agar muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap legalitas Indonesia secara agama dan sejarah. HTI digambarkan sebagai pihak yang memunculkan modus lama yang diulang-ulang, sehingga kurang efektif. Teks ini secara umum menggambarkan bagaimana HTI mengemas suatu film propaganda di hari besar keagamaan.

Sebelum penayangan, upaya promosi secara gencar di banyak sosial media hingga menjadi *trending topic* di twitter. Upaya itu bertujuan agar masyarakat awam ikut serta menonton. Objek sasaran dibidik untuk berani menonton dahulu, sebelum memberikan komentar yang sifatnya pro atau kontra. Disini, film JKDN benar-benar menyuguhkan kualitas gambar yang

bagus, dengan standard dan intonasi suara yang jelas. Jadi, penggambaran khilafah dengan Nusantara benar-benar nyata. Lebih lagi, penyampaian apapun baik itu edukasi, akan lebih menarik apabila menggunakan cara audio visual (termasuk film), karena teks dinilai kurang efektif.

Kedua, institusional. Menelusuri bagaimana pengaruh institusi organisasi dalam praktik produksi wacana. Bisa dilakukan dengan riset tentang sampel media. Beberapa faktor yang penting menjadi perhatian diantaranya tentang ekonomi media (iklan, rating, persaingan media, hingga hubungan pemilik modal). Faktor selanjutnya adalah politik media, meliputi institusi politik mana yang mempengaruhi kehidupan dan kebijakan oleh media. Media menjadi alat kekuatan dominan yang ada dalam masyarakat untuk merendahkan dan memarjinalkan kelompok lain. Misalkan, *harakatuna.com*, dengan data riset dan pengamatan, didapat hasil bahwa *harakatuna.com* cenderung merawat ideologi bangsa dengan berpegang pada Islam yang moderat, dilihat juga dari visi-misinya. Karena berbentuk situs web Islam, maka *harakatuna* hadir dengan penyampaian yang lebih moderat. Ikut bersama dalam menjaga media dari serangan faham radikalisme-terorisme yang mengatasnamakan agama.

Ketiga, sosial. Pengaruh yang menentukan media melihat pada aspek makro seperti sistem politik, sistem ekonomi, atau sistem budaya masyarakat secara keseluruhan. Sistem menentukan siapa yang berkuasa, nilai-nilai apa

yang dominan dalam masyarakat, dan bagaimana nilai kelompok yang berkuasa.

Apabila ada sebuah artikel yang merendahkan atau memarjinalkan HTI. Teks semacam ini merepresentasikan ideologi Pancasila yang ada dalam masyarakat. Dan seperti kita ketahui bahwa sejak sekolah dasar pun penerapan nilai-nilai kebangsaan telah dibangun. Artinya, ideologi masyarakat yang Pancasila itu berperan dalam membentuk teks yang Pancasila pula. Indonesia dengan suku, budaya, bahasa, agama yang beragam, merupakan bangsa yang disatukan dengan ideologi luhur para pendirinya. Bahkan sejak sekolah dasar, seluruh anak negeri dikenalkan dan mengenal apa itu Pancasila, menanamkan nilai-nilai Pancasila. Tujuannya tak lain sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Menjadi penting mengingat adanya perbedaan, yang nantinya berpeluang menjadi konflik dan tindakan diskriminasi terhadap suatu kelompok tertentu. Pancasila menjadi perwujudan dari nilai-nilai agama yang baik untuk seluruh masyarakat. Saatnya menjaga NKRI agar tidak disusupi doktrin ideologi yang tidak sesuai dengan ciri bangsa.

Ideologi Pancasila sebagai ideologi yang sah di Indonesia, nilai-nilainya diproduksi dan direproduksi di banyak tempat dan banyak bidang kehidupan, media salah satunya. Praktik sosiokultural menggambarkan bagaimana kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat memaknai dan menyebarkan ideologi yang dominan kepada masyarakat. Jadi ketika hidup

sebagai muslim di Indonesia, diharapkan menjadi pribadi yang dapat bersinergi akan nilai dan ajaran Islam, juga cita-cita luhur yang ada pada butir-butir Pancasila. Indonesia menjadi negara yang agamis, walaupun bukan negara berdasarkan agama tertentu. Karena faktanya, aktivitas hidup sehari-hari hampir tidak lepas dari nilai-nilai agama.

Menurut Fairclough, praktik sosiokultural (sociocultural practice) tidak secara langsung menentukan teks, namun dimediasi oleh praktik wacana (discourse practice). Apabila ideologi dan kepercayaan masyarakat itu Pancasila, maka hubungan dengan teks akan dimediasi oleh bagaimana teks tersebut diproduksi dalam suatu proses dan praktik pembentukan wacana. Mediasi melalui dua hal. Pertama, bagaimana teks tersebut diproduksi. Praktik diskursus yang akan secara langsung menentukan bagaimana teks yang bermuatan anti radikalisme-terorisme tersebut diproduksi. Kedua, masyarakat juga akan disuguhkan dan mengkonsumsi teks tersebut dalam pandangan ke arah Islamis-moderat. Masyarakat, misalnya, memang suka membaca berita mengenai keutuhan ideologi Pancasila. Dengan bentuk penafsiran konsumsi semacam ini, tidak dipandang aneh oleh masyarakat. Dianggap sebagai suatu kewajaran, dan didukung penuh karena ikut merawat ideologi bangsa. Demikian halnya, dengan teks yang mengagung-agungkan khilafah ala HTI, sebagai tawaran ideologi pengganti Pancasila. Hal ini menjadi tidak aneh apabila dikonsumsi oleh para simpatisan khilafah dan HTI juga. Disini

kemudian terlihat bagaimana kompleksnya hubungan dan jalinan yang carut marut seperti ini. Dua kubu yang memepertahankan kebenarannya, sesuai porsi mereka.

Teks ini mengisahkan mengenai suatu usaha HTI dalam memproduksi sebuah film propaganda politik, dengan membajak sejarah Nusantara. Sebuah organisasi yang telah dicabut *legal standingnya*, namun propaganda masih nyata dilakukan. Wacana yang dikembangkan dalam artikel ini adalah aktivitas perjuangan mereka yang tetap berlanjut dengan banyak sekali *progress*.

Ada beberapa sudut pandang secara garis besar yang akan ditampilkan dalam hasil dan pembahasan ini. Pertama, sudut pandang HTI sebagai suatu organisasi yang membawa cita-cita Taqiyuddin mewujudkan kembali Khilāfah Islamiyyah. Kedua, sudut pandang pemerintah yang menganggap HTI sebagai organisasi yang bertentangan dengan asasi negara, keutuhan NKRI dan Pancasila. Ketiga, sudut pandang Ayik Heriansyah dulunya sebagai anggota dan kini menjadi mantan HTI, dikarenakan semakin dalam pemikiran HTI tidak cocok baginya.

Pertama, sudut pandang HTI. Latar belakang mengapa HTI menjadi sangat kokoh mempertahankan untuk berdirinya khilāfah. Menurut HTI, runtuhnya Khilāfah secara resmi pada 3 Maret 1924 M. menjadi awal mula bencana dan malapetaka umat Islam. Hingga sekarang, ketika umat Islam

mengalami musibah, kekacauan, kelemahan, dan kehinaan, semua itu berawal karena runtuhnya khilafah. Keruntuhan itu berasal dari tangan orang kafir dan para anteknya. HT menyayangkan keadaan umat Islam yang selama berabad-abad hidup dalam kejayaan, semua itu berakhir karena Khilafah yang runtuh. Umat Islam yang awalnya bersatu, kemudian tercerai-berai menjadi negara kecil dan dibatasi oleh wilayah teritorial. Keanehan lagi menurut HT, negara yang terpecah itu menerapkan sistem perundang-undangan yang tidak ada hubungannya dengan agama dan akidah umat Islam. Islam menjadi satu-satunya solusi yang dapat membuang tabir kehinaan dan banyak aib kehidupan. HT menjadi organisasi pembangkit khilafah dengan mengandaikan negara-negara itu bersatu dibawah satu pemerintahan tunggal, dan dipimpin oleh seorang Khalifah. Pemikiran-pemikiran itu menjadi umum bagi HT di Indonesia, sebuah organisasi yang tujuannya merealisasikan tegaknya khilafah dimuka bumi.

Kebaikan yang ditawarkan oleh HT kemudian menjadi salah satu wacana penting dalam kekuasaan orde reformasi, masa setelah pemerintahan Soeharto. Kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998, membangun wacana tentang pengangkatan segala permasalahan umat. Suatu penyamaran proyek yang melibatkan hampir semua institusi dan disebarkan ke seluruh jenjang masyarakat. Para agen HTI menyebarkan ideologinya melalui sekolah dan banyak institusi pendidikan. Dalam menawarkan misi globalnya, ada beberapa

langkah dakwah yang dilakukan; tatsqif (pembinaan dan pengkaderan), tafa'ul (interaksi) dengan umat, dan istilam al-hukmi (menerima kekuasaan) dari umat.

Kedua, menurut sudut pandang pemerintah terhadap HTI. Membahas HTI berarti membahas politik. Ini tidak akan lepas dengan pemerintahan yang sudah eksis dahulu di Indonesia. Walaupun pengusung tegaknya khilafah tidak hanya HTI (ada ikhwanul muslimin, ISIS, dll), namun antara HTI dengan khilafah sangat dekat. Dimana ada HTI, disitu ada khilafah, begitu pula sebaliknya. HTI sangat getol mengusung gagasan khilafah kemanapun ia berada. Seiring berjalannya waktu, beberapa aktivis HTI yang kemudian keluar dari organisasi ini dan kembali mempertahankan keutuhan NKRI. Juga, ditahun 2017 HTI dibubarkan. Banyak sekali nama samaran yang digunakan oleh HTI, mudah saja untuk menyingkap mereka. Pertama, tokoh-tokoh HTI berada di belakang proyek itu. Kedua, mereka sering menggunakan istilah jihadnya, seperti kata-kata khilafah, khalifah, bendera nabi (liwa' dan rayyah), dan lainnya. Ketiga, narasi dan diksi sama ketika HTI masih eksis.

Kita dapat menemukan sudut pandang pemerintah, dengan mengamati apa saja kebijakan yang diturunkan terhadap HTI. Pada era Orde Baru segala macam organisasi keagamaan menahan diri, baru pada era Reformasi HTI berani menunjukkan wajahnya. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, HTI memperoleh *legal standing*. Terdaftar HTI sebagai organisasi sosial keagamaan di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa

dan Politik Kemendagri dengan nomor 44/D.III.2/VI/2006. Kemudian, *legal standing* itu runtuh di era pemerintahan Jokowi pada tahun 2017.

Alasan mengapa HTI kemudian dibubarkan, disampaikan oleh pihak Kemenkumham. Tiga dasar pemerintah dalam membubarkan HTI yang disebut Wiranto selaku Menkopolkam yakni: tidak berperan positif dalam pembangunan bangsa, terindikasi kuat tidak sesuai Pancasila-UUD 1945, dan secara nyata menimbulkan benturan di masyarakat. Ambisi menggulingkan sistem pemerintahan yang sah dan dasar negara yang lebih dahulu disepakati oleh para pendiri bangsa, menjadi agenda politik HTI. Alasan ini jelas akan ditolak keras HTI dengan berbagai alasannya.

Ketiga, sudut pandang mantan HTI, Ayik Heriansyah. Sudah 10 tahun berdampingan dengan HTI, menjadi bagian internal termasuk 7 tahun menjadi ketua HTI di Provinsi. Mengadopsi segala yang berkaitan dengan HTI berupa pemikiran, analisa politik, opini hukum fiqih, dan aturan administrasi organisasi. Diadopsinya segala hal yang disebutkan tanpa memandang apakah besar atau kecil, sedikit atau banyak, baik atau buruk, valid atau hoax, masuk akal atau tidak.

Karena sekarang HTI bergerak secara *underground*, dibutuhkannya agen spesialis untuk memberangus HTI di jalur informal. Keterikatan para *contributor* dan media sangat dibutuhkan dalam menangkal gerakan radikal yang mengatasnamakan agama. Ayik Heriansyah berupaya mengajak

partisipasi masyarakat dan semua elemen di dalamnya untuk bersama-sama membangun sikap peduli akan bahaya radikalisme. Kritik yang sedang dilontarkan Ayik sangat menyadarkan pentingnya pemahaman sejak awal bisa menangkal radikalisme yang kini sedang pelan-pelan merusak moral rakyat Indonesia. Indonesia yang kini ada, berdiri dalam fondasi ideologi yang telah disepakati bernama Pancasila. Menurut Ayik Heriansyah HTI gagal mengambil jalan. Seringkali isu yang dilontarkan HTI bersifat imajinatif dan imitatif, dalam artian isu yang tidak ada fakta dan realitasnya. Kesultanan di nusantara tidak saling memihak dengan khilafah yang dimaksud seperti HTI.

Kemunculan film JKDN tidak luput dari perhatian Ayik. Film yang didaku dokumenter ini merupakan penggiringan opini untuk membenarkan khilafah ala HTI. Pernyataan itu dikarenakan tema dalam film Jejak Khilafah di Nusantara dirasa masih sangat umum. Terlebih lagi, perjuangan HTI dalam membangun khilafah tahririyah tidak bisa hanya dengan melegitimasi film. Ini dikarenakan film bersifat framing, sedangkan dampaknya sangat berbahaya bagi kesadaran bangsa dan negara. Berbicara tentang film, masyarakat sekarang bahkan sangat mudah dipengaruhi olehnya. Indoktrinasi suatu paham melalui peredaran film JKDN yang sifatnya framing, dapat mengakibatkan jiwa nasionalisme menurun secara perlahan.

4. Empat Langkah Metodologi AWK

Selanjutnya, akan dipaparkan juga analisis mengenai empat langkah metodologi AWK Norman Fairclough. Keempat langkah ini digunakan untuk membongkar kepentingan penganalisa. Dalam setiap langkah ini, dimungkinkan adanya tiga dimesi yang dipaparkan sebelumnya, jika ingin menghubungkan. Empat langkah itu diantaranya:

Pertama, memfokuskan pada “ketidakberesan sosial” dalam aspek semiotiknya. Langkahnya adalah dengan memilih topik tentang ketidakberesan sosial dalam teks. Setiap teks, ada yang tidak beres. Untuk melihatnya, maka dilakukan dengan menganalisis bahasanya. Cara ini bisa dihubungkan dengan langkah pertama dimensi AWK. Disini topik ketidakberesan sosial yang sedang dibicarakan adalah masalah politik dan ideologi. HTI didalam teks, seperti sedang didiskriminasi karena tindakannya melanggar aturan. Legal standing yang dicabut pada 2017 lalu, menjadi salah satu alasan untuk HTI agar tidak lagi membuat kesalah-pahaman.

Penggunaan istilah “aktivis Hizbut Tahrir di Indonesia (HTI) terus melawan”, ingin menunjukkan seakan tulisan ini adalah cara untuk lebih memihak ke pemerintah. Ayik teridentifikasi sebagai orang yang memposisikan dirinya untuk melawan apapun tentang HTI. Konsep “bajak sejarah nusantara” sebagai bentuk metafora untuk meyakinkan kepada pembaca, seakan aktivis HTI diklasifikasi dalam arti negative. Lebih kepada penekanan bahwa, yang banyak melakukan kesalahan adalah aktivis HTI dalam segala bentuknya.

“kegigihan mereka patut diacungi dua jempol terbalik”, ungkapan ini cenderung mengarahkan bahwa propaganda khilafah akan terus dilakukan hingga politik versi mereka tercapai. Namun, ada kesalahan pada apa yang sedang diperjuangkan, sehingga dijuluki dengan “patut diacungi dua jempol terbalik”. Lebih lanjut Ayik menekankan bahwa propaganda politik yang sedang dirangkai oleh HTI, tidak berdasar kepada satu pun ayat dan hadis yang menjanjikan khilafah tahririyah akan tegak di Indonesia. Untuk semakin meyakinkan pembaca, Ayik memuliskan tiga bentuk kesesatan nalar HTI diwarnai dengan kekurangan HTI dalam menyajikan film JKDN dan Ayik cenderung memihak ideologi bangsa dan keutuhan nusantara. Dengan adanya film JKDN, secara tidak langsung aktivis HTI sedang mengkritik pemerintah saat ini walaupun gerak mereka dibatasi.

Setelah itu, menawarkan teori sosial apa yang dipakai. Supaya teks itu bisa menjadi data ilmiah. Foucault, menawarkan teori sosial tentang kekuasaan dan ini mempengaruhi pemikiran Fairclough. Diskursus/wacana sebagai praksis sosial. Wacana sebagai praktik yang terorganisir dan mengorganisir. Sebagai contoh, bahwa di Indonesia pemuka agama sangat mennetukan praktek hidup. Di dalam Islam khususnya juga seperti itu, akan diketahui bahwa Kyai A memihak organisasi NU, Kyai B memihak organisasi Muhammadiyah, Kyai C memihak organisasi HTI, Kyai D memihak LDII, dan seterusnya. Jadi, ketegangan-ketegangan antar golongan beragama juga merupakan peran pemuka agama yang besar. Karena umat hanya

mengikuti apa yang dikatakan pemimpinnya. Dalam teks ini, dapat ditelusuri bahwa Ayik sangat pro dengan pemikiran dalam NU.

Kemudian, wacana menghasilkan sesuatu. Sebagai contoh, bahwa banyak yang memberitakan HTI merupakan organisasi radikal, HTI miskin nalar, HTI sesat, dan sebagainya. Dan sejak saat itu, segala bentuk kejadian yang mengarah pada kontra-pemerintah (berbentuk khilafah), mengarah pada kesalahan HTI. Padahal kita perlu cek kebenaran atas itu.

Semua ilmu akan mempunyai klaim kebenaran sendiri. Pada akhirnya, HTI mempunyai karakteristik yang akan terus ada, begitu pula dengan NU/Muhammadiyah. Ada yang pro dengan khilafah dan ada yang kontra, semua punya klaim sendiri. Praktek wacana adalah praktek sosial. Dalam hal ini, diskursus/wacana bukan hanya sekedar wacana. Wacana mendikte, wacana menggerakkan sesuatu, wacana membuat norma.

Kedua, mengidentifikasi hambatan-hambatan untuk menangani “ketidakberesan sosial” itu. Yang menghambat untuk memecahkan masalah. Peneliti menganalisis teks berjudul “Bajak Sejarah Nusantara, HTI Produksi Film Propaganda Politik”. Alasan dalam teks yang menghambat itu, dikemukakan apa saja. Bahasa seakan hanya sekedar alat komunikasi. Padahal bahasa mengandung ideologi dan menjadi instrument kekuasaan.dengan mudah, bahasa digunakan sebagai alat untuk mendominasi, menindas, atau mendiskriminasi. Dalam artikel ini, bahasa digunakan untuk mempertahankan sistem pemerintahan negara secara tidak langsung.

Pilihan kata merupakan bentuk habitus. Jadi, pilihan kata merupakan hasil pelatihan dan pembiasaan. Menunjukkan juga betapa ideologi sudah dibekukan di dalam bahasa.

Ketiga, apakah tatanan sosial itu “membutuhkan” ketidakberesan sosial tersebut. Apakah ketidakberesan sosial melekat pada tatanan sosial? Mengidentifikasi siapa yang diuntungkan sehingga menghendaki ketidakberesan sosial itu.

Tatanan sosial saat ini adalah, Indonesia dengan sistem pemerintahan sekarang merupakan hasil finis dari ijtihad para pendiri bangsa dan ulama nusantara. Jadi bentuk pemerintahan saat ini dirasa sudah final. Fakta Indonesia sebagai negara yang bersuku-suku dengan ribuan kemajemukan, menjadikan perkara khilafah tidak relevan diterapkan di Indonesia. Sedangkan ketidakberesan sosial yang digambarkan dalam teks adalah upaya HTI ingin berjuang melawan agar sistem pemerintahan Indonesia berganti menjadi sistem khilafah. Ketidakberesan mengenai propaganda HTI disini dapat ditangani hanya sebatas pada pencabutan legal standing, pemblokiran situs web HTI, dan banyaknya kontranarasi akan bahaya HTI oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah.

Jika tatanan sosial menghasilkan ketidakberesan sosial sebesar propaganda politik HTI saat ini yang tidak pernah mati, maka ini berkaitan dengan adanya ideologi dominasi. Ideologi yang ditawarkan HTI kemudian ditolak, berhubungan erat karena Indonesia juga sangat mempertahankan ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Ketidakadilan dan juga dominasi itu, yang kemudian menjadikan HTI mengkritik

pemerintah dengan jalan mengeluarkan film JKDN. Sikap HTI saat ini lahir karena adanya kritik HTI terhadap pemerintah.

Dalam teks digambarkan apabila tatanan sosial saat ini tidak membutuhkan adanya tawaran sistem Khilafah. Yang diuntungkan dalam ketidakberesan sosial ada dua pihak yang berlawanan. Pertama, menurut kacamata pro-pemerintah, dalam teks digambarkan adalah para syabab HTI. Kedua, menurut kacamata pro-khilafah, maka yang diuntungkan adalah organisasi dibalik pemerintah seperti NU dan Muhammadiyah.

Keempat, mengidentifikasi cara-cara yang memungkinkan untuk mengatasi hambatan-hambatan. Aksi alternatif dalam control terhadap penerbitan suatu analisis berita. Dibentuknya asosiasi pembaca kritis yang selalu megawasi publikasi yang berfungsi seperti pelindung konsumen. Membentuk lembaga independen seperti CNRCT merupakan langkah nyata untuk menanggulangi kejadian yang bernilai berbahaya. *Center for Narrative Radicalism and Cyber Terrorism (CNRCT)* pusat studi yang fokus terhadap kajian narasi-narasi radikalisme dan *cyber terrorism*. Lembaga ini bertujuan meminimalisir penyebaran paham radikalisme dan terorisme siber yang banyak beredar di masyarakat baik secara daring maupun luring. CNRCT menjadi jalan solusi dan alternative narasi atas narasi dan wacana yang diproduksi oleh kelompok radikal-teroris.

Di Indonesia, masyarakat yang menjadi target akan disetir bukan menggunakan jalan fisik, namun lebih ke pemikiran dan hasutan ide-ide. Film JKDN menjadi satu kegiatan propaganda dengan beberapa alasan berikut: pengetahuan tentang HTI, khilafah, dan khalifah menjadi umum. Strategi politiknya dilakukan dengan memprovokasi masyarakat awam agar tidak mempercayai pemerintah. Berusaha menggiring opini, dan berakhir dengan kesimpulan, dengan khilafahlah bangsa Indonesia bisa merasakan nikmat iman dan Islam. Pengetahuan yang terus ditanam ke benak para masyarakat awam melalui serangkaian institusi, media sosial diantaranya. HTI tidak akan diam apabila khilafah belum tegak di bumi. Kufur, sebagai cap yang diberikan HTI kepada para muslim yang tidak membela, dan berjihad menegakkan khilafah.

2. Pada tahap analisis, melalui tiga tahapan dimensi (*text, discourse practice, dan sociocultural practice*) dan empat langkah metodologi AWK. Dalam penelitian ini, model analisis wacana kritis Norman Fairclough dalam teks artikel berikut “Bajak Sejarah Nusantara, HTI Produksi Film Propaganda Politik”. Akan tetapi pembahasan terbatas pada satu judul artikel, satu *sample* media yakni situs web Islam *harakatuna.com*, dengan satu *contributor* yakni Ayik Heriansyah. *Analisis teks* menunjukkan hasil, didapat pengertian sebagai berikut: Film merupakan objek yang digunakan oleh pihak HTI sebagai alat propaganda politik. HTI sebagai pihak yang memproduksi dan merealisasikan film sebagai bentuk propaganda khilafah.

Bajak sejarah nusantara, sebagai aksi ambil alih secara paksa sejarah kesultanan di Nusantara, sebagai bentuk pewujudan film Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN). Politik, sebagai basis dari pergerakan HTI untuk tetap jihad mendirikan negara Islam yang berideologi khilafah ala HTI. Tidak menggunakan cara kasar, HTI lebih memilih mengedukasi khilafah kepada masyarakat lewat film.

Analisis wacana menunjukkan hasil, Artikel yang ditulis oleh Ayik Heriansyah secara keseluruhan merupakan kritiknya terhadap HTI. Jadi, alasan marjinalisasi ini lahir dari suatu proses produksi berita yang bisa dikatakan, berstruktur timpang. Ketimpangan itu muncul karena dominasi ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah ala HTI. Kemudian, *harakatuna.com* merupakan media dakwah berbasis keislaman dan kebangsaan yang fokus pada penguatan pilar-pilar kebangsaan dan keislaman dengan ciri khas keindonesiaan. Dengan penyajian konten yang lugas, kritis, dan objektif bersandikan pada dalil ilmiah yang kuat dan serta didukung rujukan teks keagamaan yang otoritatif. *Analisis sosiokultural* menunjukkan hasil, apabila ada sebuah artikel yang merendahkan atau memarjinalkan HTI. Teks semacam ini merepresentasikan ideologi Pancasila yang ada dalam masyarakat. Dan seperti kita ketahui bahwa sejak sekolah dasar pun penerapan nilai-nilai kebangsaan telah dibangun. Artinya, ideologi masyarakat yang Pancasila itu berperan dalam membentuk teks yang Pancasila pula. Indonesia dengan suku, budaya,

bahasa, agama yang beragam, merupakan bangsa yang disatukan dengan ideologi luhur para pendirinya. Menjadi penting mengingat adanya perbedaan, yang nantinya berpeluang menjadi konflik dan tindakan diskriminasi terhadap suatu kelompok tertentu. Pancasila menjadi perwujudan dari nilai-nilai agama yang baik untuk seluruh masyarakat. Saatnya menjaga NKRI agar tidak disusupi doktrin ideologi yang tidak sesuai dengan ciri bangsa.

Sedangkan dalam empat langkah metodologi AWK dapat disimpulkan bahwa ketidakberesan yang coba diulas dalam teks adalah permasalahan politik dan ideologi secara umum. HTI membawa propaganda khilafah lewat film JKDN. Ketidakberesan sosial itu lahir juga dari kritik HTI terhadap pemerintah. HTI berusaha memperjuangkan ideologi khilafah tahririyah yang digadang-gadang akan terwujud di Indonesia. Sedangkan pemerintah Indonesia dengan dominasi dan akses kuasa, menghalangi dan tetap menjaga keutuhan NKRI. Dengan begitu, posisi Ayik sebagai penulis wacana juga dapat diungkap, apa sebenarnya ideologi yang ia bawa. Diskursus/ wacana bukan hanya sebagai alat komunikasi, namun wacana dapat menjadi instrument kekuasaan, dan dibaliknya ada dominasi ideologi. Untuk mencegah ketidakberesan sosial itu, maka dibentuknya CNRCT bisa menjadi peluang jawaban.

Sesungguhnya Islam adalah agama yang membawa perdamaian, toleransi, dan senantiasa menghargai perbedaan. Tanpa khilafah HTI, ajaran

- Ghofar, Muhammad Azizul. *Salah Kaprah Khilafah*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Google Scholar, norman fairclough - Google Cendekia, diakses 20 Juli 2021.
- Hasan, Noorhaidi. *Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi, Apropriasi, dan Kontestasi*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018.
- Harakatuna, <https://harakatuna.com/jejak-khilafah-di-nusantara-manipulasi-sejarah.html>, diakses pada 20 Agustus 2020.
- Haryatmoko, “Webinar Analisis Wacana Kritis: Praktik dan Penerapannya (UNPAM)”, https://www.youtube.com/watch?v=Zo_uZNjGrUY&t=2383s, diakses pada 20 Juli 2021.
- Heriansyah, Ayik. *Wawancara*. via Whatsapp, 5/01/2021.
- Heriansyah, Ayik *Mengenal HTI Melalui Rasa Hati*. Jakarta: Pustaka Harakatuna, 2020.
- Heriansyah, Ayik. <https://harakatuna.com/4-sila-khilafah-tahririyah-yang-membuat-beku-otak-pejuangnya.html>, diakses pada 20 September 2020.
- HTI, Tim. *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia; Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*. Jakarta: HTI-Press. 2009.
- KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/artikel>, diakses 3 Maret 2021
- KBBI, <https://kbbi.web.id/manifesto>, diakses 23 November 2020.
- KBBI, <https://kbbi.web.id/propaganda>, diakses pada 16 November 2020.
- Kurniawati, Etik Dwi. *Khilafah Islam Versus Pancasila: Studi Tentang Perdebatan Ideologi di Kalangan Generasi Milenial Melalui Media Sosial*. Skripsi-- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Lasswell, Harold D. “The Theory of Political Propaganda”, *The American Political Science Review*, Vol. 21, No. 3. Agustus 1927.
- Manaf, Ngusman Abdul. *Sintaksis: Teori dan Terapannya dalam Bahasa Indonesia*. Padang: Sukabina Press, 2009.

- Mahmudi, M. Alif. “Propaganda dalam Film; Analisis Teknik Propaganda Anti-Iran dalam Film Argo”, *Jurnal Komunikasi PROFETIK*, Vol. 06, No. 2. Oktober, 2013.
- Munfarida, Elya. “Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough”, *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 8, No.1. Januari-Juni 2014.
- Muqtada, M. Rikza. “Ḥadis Khilāfah dan Relasinya Terhadap Kontestasi Politik Hizbut Tahrīr Indonesia (HTI) Pasca Perpu Nomor 2 Tahun 2017”, *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 8 No. 2, 2018.
- Muzakka, Ahmad Khotim. “Propaganda Khilafah HTI di Indonesia”, *JURNAL PENELITIAN*, Vol. 14, No. 2, 2017.
- Norman Fairclough | Lancaster University - Academia.edu, diakses 20 Juli 2021.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. tt: Prenada Media, 2016.
- Qohar, Abdul dan Kiki Muhamad Hakiki,. “Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional HTI Sebelum dan Sesudah Pembubaran”, *Kalam*, Vol. 11, No. 2, Desember, 2017.
- Redaksi Harakatuna.com | Harakatuna.com
- Ronaldy, Prabowo Memasukkan Kader PKS-HTI-ISIS DI BUMN Pertahanan? Berbahaya - Nawacita (nawacitapost.com), diakses pada 28 Mei 2021.
- Sarwanto, Abi. <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170723183459-20-229798/situs-resmi-hti-diblokir-pemerintah>, diakses pada 08 November 2019.
- Semma, Mansyur. *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik* (tt: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 282. Dikutip dari Norman Fairclough (ed), *Language and Power: Relasi Bahasa, Kekuasaan dan Ideologi* (Malang: Boyan Publishing, 2003).
- Shofwan, Arif Muzayin. “Pandangan Hizbut Tahrir Terhadap Radikalisme Gerakan ISIS Dalam Menegakkan Daulah Khilafah”, *Jurnal Addin*, Vol. 10, No. 1. Februari, 2016.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

